



MEDIA INFORMASI KEGIATAN (MIK) BBTKLPP YOGYAKARTA

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BBTKLPP YOGYAKARTA**

Kantor 1 : Jl. Wiyoro Lor No. 21, Baturetno, Banguntapan, Bantul 55197 Telp. 0274-371588 Fax. 0274-443284

Kantor 2 : Jl. Imogiri Timur Km. 7.5, Wirokerten, Banguntapan, Bantul 55197 Telp. 0274-443283



Tim

Penyusun

Penanggung Jawab

Dr. dr. Irene, MKM

Pemimpin Redaksi

Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH

Wakil Pemimpin Redaksi

Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt

Sekretaris Redaksi

Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H

Sekretaris Redaksi

Nadia Regina Martanti, SKM

Redaktur Bidang ADKL

Feri Astuti, ST, MPH

Redaktur Bidang SE

Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes

Redaktur Bidang PTL

Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc

Redaktur Bagian Tata Usaha

Heni Amikawati, S.K.M.

Redaktur Pelaksana

Mardiansyah, S.Kom, M.P.H

Ardhiles

Nuryadi



Sambutan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas diterbitkannya buku Media Informasi Kegiatan (MIK) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta.

Buku ini disusun sebagai media komunikasi informasi bagi masyarakat luas, karena BBTKLPP Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak atas informasi masyarakat yang dilayaninya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan tuntutan Reformasi Birokrasi.

Akhir kata, tak ada yang sempurna, begitu juga Buku MIK BBTKLPP Yogyakarta yang kami susun ini. Oleh sebab itu kami terbuka terhadap saran yang membangun guna terwujudnya Buku MIK BBTKLPP Yogyakarta yang lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala BBTKLPP Yogyakarta,



**Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP197206032002122008**

Daftar isi

Tim Penyusun	i
Sambutan	ii
Daftar Isi	iii
Pertemuan Desk dan Reviu Catatan Halaman IV DIPA (Blokir) Ditjen P2P TA. 2020	1
Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program Malaria Tahun 2019 Dan Perencanaan Program Tahun 2020	2
Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu (Dumasdu)	3
Kunjungan Kerja Dirjen P2P Kemenkes RI Pada Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020	4
Koordinasi Pemetaan Potensi Risiko Lingkungan Pada Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020	5
Pertemuan Rekonsiliasi Dan Reviu Laporan Keuangan UAPPA/B Esselon 1 Ditjen P2P Ta 2019 (Satker, Kantor Pusat, dan Dekonsentrasi)	6
Pengambilan Sampel Lingkungan Dalam Rangka Pemantauan Lingkungan Penyakit Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta	7
Rapat Koordinasi/Konsultasi Kegiatan TTG Dan Sanitarian BBTKLPP Yogyakarta Dengan Dinkes Kota Sawahlunto, Sumatera Barat	8
Pertemuan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Keprotokoleran dan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Ditjend P2P	9
Peninjauan Dan Finalisasi Penyerahan Aset Pemda DIY	10
Sekolah Di Kabupaten Kulon Progo DIY	11
Pertemuan Penguatan SDM Tenaga Kesehatan, Keswan dan Lintas Sektor Lainnya dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Penyakit Antrak di Kabupaten Gunungkidul	12
Persiapan Dan Pengumpulan Data Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Di Lingkungan Sekolah Di Kabupaten Wonogiri	13
Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Wabah Virus Corona Di Daerah Istimewa Yogyakarta	14
Pertemuan Jejaring B/BTKLPP Se-Indonesia Untuk Membahas Standardisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Serta Penetapan Layanan Unggulan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit	14
Upaya Sinergi Kemkes RI melalui BBTKLPP Yogyakarta dan BNPB dalam Kesiapsiagaan Bencana	16
Sosialisasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul	17
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Terkait Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020	19



Assesment Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi BBTCLPP Yogyakarta oleh Komite Akreditasi Nasional	20
Pembahasan dan Penelaahan Usulan Perencanaan Anggaran Pembahasan dan Kegiatan Program P2P TA. 2021	21
Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacangan	22
Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Pada Embarkasi Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jawa tengah	23
Pengambilan Data Lingkungan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Di Lingkungan Sekolah Kabupaten Kulon Progo	24
Konsolidasi Petugas Satuan Pengamanan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Pelanggan dan Keamanan di BBTCLPP Yogyakarta	24
Konsolidasi Tenaga Cleaning Service dalam Rangka Peningkatan Kebersihan dan Keindahan di BBTCLPP Yogyakarta	25
Surveilans Perilaku Vektor Dan Konfirmasi Vektor DBD Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	26
Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program P2P Tahun 2020	27
Rapat Koordinasi Dan Pencanaan Sp 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta	28
Sosialisasi Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	30
Pertemuan Penilaian Mandiri Penatalaksanaan Kantor Berhias, Koordinasi Belanja Pegawai Dan Operasional Direktorat Jenderal P2p	31
Peningkatan Kapasitas Sdm Teknis Sanitarian Bbtclpp Yogyakarta Tahun 2020	32
Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacangan	33
Pertemuan Evaluasi Sakip Satker Pusat Dan Daerah	34
Sosialisasi E-office Kementerian Kesehatan Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2020	35
Pemeriksaan Covid-19 Dengan Rapid Test Untuk Petugas Pelayanan Covid-19 Bbtclpp	36
Kunjungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (diy) Sri Sultan Hamengku Buwono X Di Bbtclpp Yogyakarta Dalam Rangka Koordinasi Dan Tinjauan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (covid-19)	37
Pertemuan Jejaring Laboratorium Rujukan Covid-19 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dan Diy	38
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Klinik Pratama Di Diy	39
On The Job Training Pengambilan Sampel Usap Dan Manajemen Sampel Covid-19	40
Pertemuan Sosialisasi End User Training Aplikasi E-spm	40
Teleconference Koordinasi Unit Utama (ditjen P2p) Dan Satkernya Terkait Rencana Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19	41
Rapat Persiapan Pelayanan Covid-19 Selama Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H	42
Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Unit Pelaksana Teknis (upt) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan (ditjen P2p) Kementerian Kesehatan Tahun 2020 ..	43

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441H, Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir Dan Batin	44
Pertemuan Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas (zi) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbkm) Bbtklpp Yogyakarta	45
Virtual Meeting Pembahasan Aplikasi Logistik Covid-19	46
Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2020 Di Bbtklpp Yogyakarta	46
Selamat Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2020	47
Penilaian Internal Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Bbtklpp Yogyakarta	47
Virtual Meeting Dinas Kesehatan Diy Menghadapi Masa New Normal Diy	48
Pengumpulan Data Terkait Layanan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit Covid Di Kabupaten Gunungkidul Diy Tahun 2020	49
Pembahasan Sosialisasi Dan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum	50
Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam Pkam	51
Pengumpulan Spesimen Dan Data S3je	52
Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial Klb Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta Tahun 2020	53
Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam Pkam	54
Webinar Internasional Perkembangan Dan Pengembangan Metoda Surveilans Vektor Berbasis Molekuler	55
Pengambilan Sampel Polio Lingkungan Di Ipal Semanggi Surakarta	57
Zoom Meeting Penguatan Jejaring Laboratorium Pcr Di Jawa Tengah	58
Zoom Meeting Kamis Pahingan Dengan Tema Monitoring Dan Konfirmasi Data Capaian Output Tahun 2020 Dan Redesain Sistem Penganggaran Tahun 2021	59
Sinergitas Laboratorium Pemeriksa Covid-19	61
Peran Bbtklpp Yogyakarta Sebagai Laboratorium Rujukan Pemeriksaan Dalam Swab Test Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Yang Melakukan Perjalanan Dari Wilayah Indonesia Dengan Transmisi Lokal Virus Covid-19	62
Bimtek Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Sakip Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)	63
Workshop Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Angkatan I	64
Kepala Balai	v
Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi	vi
Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	vi
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium	vii
Kepala Bagian Tata Usaha	vii



Semangat kami dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di bumi Pertiwi...



Dr. dr. Irene, MKM

Kepala Balai Menyeru...

BBTKLPP Yogyakarta hadir sudah lama, mengabdikan demi terwujudnya Indonesia Sehat. Tahun ini kita sedang dicoba dengan merebaknya corona virus disease (COVID-19) yang memakan banyak korban, banyak sumber daya tercurah, semua lini ikut terdampak.

Sepuluh perjalanan sudah dilalui di tahun ini, BBTKLPP Yogyakarta terus melakukan penguatan surveilans, responsif terhadap bencana dan meningkatkan kemampuan laboratorium sebagai laboratorium rujukan Nasional untuk pemeriksaan COVID-19 yang diamanahkan.

Pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak menguras energi dan pikiran. Jangan turunkan imun dengan rasa ketakutan. Sematkan diri menjadi pahlawan dengan terus menjalankan protokol Kesehatan dan mematuhi kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Saat ini kita diminta untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita lanjutkan aktifitas, tumbuhkan kreatifitas, tangkap peluang, munculkan pemikiran cemerlang yang menghasilkan ide-ide brilian dalam beradaptasi di era new normal.

Kami hadir untuk Anda.. untuk Kami.. untuk Kita....untuk Indonesia..

Kita jangan mau kalah, berjuang sampai menang, bersama kita bisa....

Ayo bangkit Negeriku...



Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes

Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi

Pandemi covid-19 sebagai musibah yang harus disikapi dan bukan untuk ditakuti. Berdasarkan bukti ilmiah kita kenal factor risiko dari kejadian Covid 19, adalah : dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Dasar tersebut dijadikan pertimbangan mendasar bagi kita dalam melangkah untuk pencegahan dan pengendalian persebaran Covid 19. Melalui kegiatan surveilans Epidemiologi dengan mengedepankan percepatan Identifikasi Kasus, survey kontak serta kepatuhan protocol kesehatan diharapkan persebaran Covid-19 di seluruh wilayah dapat segera diHENTIKAN.

Feri Astuti, ST, MPH



Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan

Penyebaran COVID-19 di Indonesia secara umum belum menunjukkan kecenderungan untuk menurun secara signifikan. Berbagai upaya oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19.

Mendukung pencegahan penularan COVID-19, kami terus melakukan rangkaian kegiatan untuk meminimalisir dampak Kesehatan lingkungan yang dapat saja terjadi. Pelaksanaan desinfeksi mutlak diperlukan dalam upaya mamotong rantai penularan yang bisa terjadi. Desinfeksi dilakukan secara rutin baik di lingkungan sekitar kantor yang berpotensi menjadi titik penularan maupun di laboratorium sebagai protokol laboratorium BSL II. Hal ini sangat penting dalam rangka memberikan keamanan kerja bagi petugas Kesehatan di laboratorium, pegawai dan juga memberikan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar.

Kualitas lingkungan Sekolah perlu juga diperhatikan, kami telah melakukan kajian Surveilans Faktor Risiko Penyakit berpotensi KLB dilingkungan Sekolah di wilayah kerja DIY dan Jateng. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan Sekolah Dasar yang menjadi faktor risiko penyakit berpotensi KLB sebagai bentuk dukungan bagi pengambilan kebijakan strategis di wilayah khususnya dalam penularan COVID-19. Faktor risiko lingkungan sekolah yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan adalah: ketersediaan TPS, keberadaan vektor, ketersediaan wastafel, kondisi kelas, PHBS penjamah makanan di kantin, kualitas jajanan dan kualitas air bersih yang digunakan di sekolah.



Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc

Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium

Di tahun ini pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang luar biasa..... Kemampuan uji pemeriksaan COVID-19 dalam rangka penegakan diagnosa penyakit telah dikembangkan. Jumlah spesimen yang terus bertambah telah diimbangi dengan upaya mengoptimalkan sumber daya laboratorium yang tersedia melalui peningkatan kapasitas SDM laboratorium dan penambahan sarana prasarana. Segenap upaya dilakukan untuk menjamin kecepatan dan keakuratan hasil uji. Pengembangan desain baru Teknologi Tepat Guna (TTG) pendukung penanggulangan COVID-19 seperti desinfeksi ruangan, pengelolaan limbah, perlindungan personal laboratorium dalam rangka keamanan dan pencegahan penularan terus dihasilkan. Dukungan laboratorium akan terus menerus dilakukan. Kita lawan bersama penyakit menular yang melanda negeri ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan protokol normal baru.

Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH



Kepala Bagian Tata Usaha

Virus corona yang mewabah di Indonesia membuat masyarakat jadi lebih waspada dalam menjaga kesehatan. Tak bisa dipungkiri pandemik COVID-19 ini memberikan banyak perubahan pada kehidupan, khususnya dampak pada segi kesehatan masyarakat yang terlihat begitu jelas.

Menghadapi COVID-19 bukan berarti melawan dengan menggunakan senjata, namun imunitas dan pikiran yang sehat bisa jadi tameng terbaik untuk mengurangi penyebaran virus corona.

BBTKLPP Yogyakarta sebagai salah satu Laboratorium Rujukan Nasional COVID-19 selama masa pandemik COVID-19 menuntut dedikasi seluruh pegawai pada pengabdian dan tetap masuk kerja. Semua lini bahu membahu dalam upaya memberikan sumbangsih bagi terwujudnya pelayanan penanganan COVID-19 yang prima, cepat dan tepat.

Bagian Tata Usaha dalam upayanya meningkatkan imunitas pegawai agar tubuh selalu dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dengan membuat program pemberian daya tahan tubuh (PDTT), berupa suplemen susu dan vitamin C serta suntikan vaksin terhadap para nakes laboratorium dan pegawai yang terkait langsung dalam penanganan COVID-19. Selain daripada itu untuk memenuhi kebutuhan reagensia, APD dan BHP COVID-19, Bagian Tata Usaha melakukan langkah refocussing beberapa kegiatan program di bidang maupun bagian guna memenuhi kebutuhan logistik laboratorium COVID-19 dan dukungan pengendalian COVID19 lainnya yang belum teralokasikan anggarannya di DIPA BBTKLPP Yogyakarta TA 2020.

Kepada seluruh pegawai BBTKLPP Yogyakarta, khususnya teman-teman Analis dan pendukungnya di Laboratorium yang menangani langsung COVID-19 semoga semua terus dilindungi, terus semangat dan selalu sehat.

Pertemuan Desk dan Reviu Catatan Halaman IV DIPA (Blokir) Ditjen P2P TA. 2020



Bekasi. Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan desk dan reviu catatan halaman IV DIPA (Blokir) Ditjen P2P TA. 2020 yang berlangsung dua periode 14 sd 17 Januari 2020 dan 21 sd 25 Januari 2020. Pertemuan dihadiri oleh peserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P yang memerlukan proses pengguguran blokir (bintang) di halaman IV DIPA masing-masing satker. Pelaksanaan proses reviu ini dilakukan oleh Ditjen P2P selaku unit utama, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemkes serta Itjen Kemkes RI secara bertahap.

BBTKLPP Yogyakarta diwakili oleh Kasubag Program dan Laporan beserta tim perencananya. Pada kesempatan ini Sesditjen P2P memberikan arahan atas beberapa hal terkait kebijakan perencanaan dan anggaran tahun 2020. Diharapkan semua satker dapat mematuhi rambu tersebut dan meningkatkan koordinasi dalam implementasinya.

Rangkaian paparan narasumber dari Kementerian Keuangan (DJA) dan Inspektorat Jenderal Kemkes RI memberikan sosialisasi dan pemutakhiran informasi terkait hal serupa. Kementerian Keuangan memsocialisasikan terkait tata cara revisi yang berlaku di Tahun Anggaran 2020 dan gambaran penggunaan Aplikasi SAKTI yang kedepan akan digunakan sebagai media input data usulan perencanaan menggantikan Aplikasi RKAKL offline yang selama ini digunakan. Narasumber Inspektorat Jenderal Kemenkes RI menyampaikan bahwa tugas utama Itjen adalah mengawal aturan yang berlaku, sehingga diharapkan usulan satker dapat memenuhi kaedah aturan yang berlaku. Reviu yang dilakukan Inspektorat Jenderal selaku APIP Kemkes tidaklah memindahkan tanggungjawab pelaksanaan anggaran satker kepada Itjen Kemkes RI. Tanggungjawab pelaksanaan anggaran termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan kerja.

Setelah rangkaian acara paparan narasumber berakhir, satuan kerja kemudian melaksanakan reviu berjenjang selama dua periode penuh dalam rangka menggugurkan blokir pada dokumen anggaran DIPA Satker. BBTKLPP Yogyakarta melakukan proses pengguguran bintang halaman IV DIPA untuk kegiatan pengadaan Alat Laboratorium dengan berbekal surat KepDirjen P2P No.HK02.02/1/3130/2019 tentang Standarisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Penetapan Layanan Unggulan pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Proses buka blokir ini berjalan lancar dengan diterbitkannya Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh Tim APIP dengan bersih tanpa catatan. CHR ini kemudian akan menjadi pendukung proses pembersihan halaman IV DIPA BBTKLPP Yogyakarta di Kementerian Keuangan. Harapannya proses lanjutan ini akan berlangsung dengan lancar, baik dan tidak terkendala agar kegiatan dapat dilaksanakan dan pelayanan dapat diberikan segera kepada masyarakat.

Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program Malaria Tahun 2019 Dan Perencanaan Program Tahun 2020



Pencegahan dan Pengendalian Malaria merupakan salah satu program prioritas nasional - Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen. P2P) Kementerian Kesehatan RI. Dalam rangka mencapai tujuan nasional program P2 Malaria, yakni tercapainya eliminasi malaria di seluruh provinsi/pulau di akhir tahun 2030 maka secara nasional telah dilaksanakan program P2 Malaria tahunan, terutama bagi kabupaten/kota endemis. Anggaran pembiayaan program P2 Malaria di pusat (unit utama) dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) antara lain bersumber dana Global Fund (GF) Komponen Malaria yang ada di Subdit. Malaria. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 dan memasuki tahun anggaran 2020 maka Subdit.

Malaria Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (Dit. P2PTVZ) telah menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 15 – 18 Januari 2020 yang bertajuk **“Monitoring dan Evaluasi Program Malaria Tahun 2019 dan Perencanaan Program tahun 2020”**. Tujuan pertemuan tersebut terutama adalah: (1) untuk mengevaluasi capaian dan permasalahan dalam pelaksanaan program P2 Malaria tahun 2019, yang berguna sebagai bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang, dan (2) koordinasi dan sinkronisasi program P2 Malaria tahun 2020 antara pusat dan daerah, terutama untuk penguatan dan percepatan pelaksanaannya di daerah.

Pada acara pembukaan, Bapak Dirjen. P2P (dr. Anung Sugihantono, M.Kes) berkesempatan membuka pertemuan secara resmi dan memberikan arahan. Pertemuan diikuti oleh perwakilan dari 34 Dinas Kesehatan Provinsi, masing-masing dengan 5 perwakilan, terdiri dari Kepala Bidang/Kepala Seksi, PPO, Pengelola Program Malaria, Bagian Keuangan dan administrator, ditambah dengan perwakilan dari 10 B/BTKLPP se Indonesia yang masing-masing diwakili oleh Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi (Kabid. SE). Terkecuali dari BBTCLPP Yogyakarta, selain Kepala Balai (Dr. dr. Irene, MKM), perwakilan pesertanya berjumlah tiga orang, terdiri dari Kabid. SE (Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes), fungsional Epidemiolog (dr. Nur Subagyo, MPH) dan Entomolog Kesehatan (Dr. Andiyatu, SKM, M.Si). Peserta lainnya berasal dari instansi terkait, yakni Puslitbang. Biomedis dan TDK, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Balitbang (BBPPVRP) Salatiga, Balitbang Papua, dan KKP Kelas IV Yogyakarta.

Selama pertemuan berlangsung, telah dilaksanakan paparan materi dan diskusi dari materi narasumber pusat dan daerah. Materi pokok yang disampaikan, antara lain: (1) Update Kebijakan dan Evaluasi Capaian Program Direktorat P2PTVZ (Direktur P2PTVZ), (2) Update Kebijakan Malaria, Monev. Kegiatan dan Capaian Tahun 2019, Perencanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Diseminasi Kegiatan dalam Rencana Aksi Malaria 2020-2024 (Kasubdit. Malaria), (3) Rencana Operasional Kegiatan Subdit Malaria Tahun 2020, Evaluasi Dekon dan DAK 2019, 2020 dan Perencanaan Dekon dan DAK 2021 (Kasie. Pengendalian Subdit Malaria), (4) Evaluasi Pelaksanaan Hibah GF Malaria Tahun 2019 dan Petunjuk Perencanaan GF Tahun 2020 dan Persiapan Distribusi Kelambu 2020 (PMU GF Komponen Malaria), (5) Evaluasi dan Perencanaan Penilaian Eliminasi Malaria dan Sosialisasi Tools Eliminasi Tingkat Provinsi (Kasie. Pencegahan Subdit Malaria), (6) Evaluasi Hasil Pendampingan WHO di Jawa-Bali menuju eliminasi tingkat provinsi dan regional dan UNICEF untuk penurunan kasus di daerah endemis tinggi (dr. Herdiana Basri, M.Kes, M.Epi dan dr. Maria Endang Sumiwi, MPH).

Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu (Dumasdu)



B BTKLPP Yogyakarta merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang sangat rawan terhadap adanya komplain atau pengaduan. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diselenggarakan Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu oleh Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan memberi pengetahuan tentang dumasdu kepada pegawai. Pertemuan ini dihadiri oleh semua pejabat struktural, Kepala Instalasi dan seluruh tim WBK.

Acara diawali dengan sambutan Kepala BTKLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H. Dalam sambutannya disampaikan terima kasih atas kehadiran nara sumber dari Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Dumasdu merupakan salah satu layanan publik yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat pelayanan publik. Diharapkan dalam pertemuan bisa diskusi secara aktif untuk perbaikan BTKLPP Yogyakarta.

Sambutan kedua sekaligus penyampaian materi oleh Bagian Advokasi Hukum dan Hubungan

Masyarakat Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Iwan Sopyan Fauzi, S.K.M., M.H.Kes. Ucapan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dari BTKLPP Yogyakarta. Diinformasikan untuk saat ini di lingkungan P2P dibuka jabatan fungsional baru yaitu Pranata Humas, Promkes dan Pustakawan, silahkan satker membuka peta jabatan untuk jabatan fungsional tersebut disesuaikan dengan beban kerja masing-masing satker. Kegiatan-kegiatan pusat yang dilaksanakan di daerah menjadi tugas pranata humas di satker untuk meliputnya sehingga tidak ada yang terlewat. Setelah sambutan dan arahan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Manajemen Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes yang berisi diantaranya tentang dasar aturan, definisi, mekanisme dan implementasi. Materi yang disampaikan sangat padat, jelas dan menarik sehingga diskusi berlangsung dengan penuh semangat.

Acara ditutup oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dian Trikoriati, S.T., S.K.M., M.P.H. Ucapan terima kasih disampaikan atas pencerahan yang sudah diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat sebagai bekal untuk mempertahankan WBK dari Kemenkes yang sudah diraih.

Kunjungan Kerja Dirjen P2P Kemenkes RI Pada Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020



Menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi pengendalian penyakit antraks di Hotel Mercure Yogyakarta antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Januari 2020. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Anung Sugihantoro, M.Kes didampingi Kepala BBTKLPP Yogyakarta, Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta dan Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul serta Jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berkesempatan untuk bertemu dengan Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos beserta jajarannya.

Pada pertemuan yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati tersebut Bupati Gunungkidul mengucapkan terima kasih atas perhatian Kementerian Kesehatan terkait dengan respon adanya kejadian antraks di Kabupaten Gunungkidul dan berharap kejadian antraks tidak mempunyai dampak pada perekonomian di Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah pariwisata. Pada kesempatan tersebut Dirjen P2P Kementerian

Kesehatan memberikan dukungan atas upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Pertanian dalam upaya Pengendalian kejadian Antraks yang terjadi. Namun demikian beliau juga tetap mengingatkan bahwa terkait dengan kejadian penyakit zoonosa ada tiga faktor utama yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian kejadian seperti pada penyakit antraks yaitu penanganan terkait dengan manusia, hewan dan lingkungannya. Ketiga faktor tersebut secara sinergi harus di atasi secara terintegrasi dalam bentuk implementasi one health dan Kementerian Kesehatan bisa mendukung untuk penanganan terhadap dua faktor utama yaitu pada manusia dan lingkungannya. Dalam awaktu dekat juga disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta akan segera melatih sebanyak 200 tenaga kesehatan dan tenaga lintas sektor lainnya terkait dengan Tata Laksana penyakit antraks dan surveilans antraks pada Manusia dan hewan, serta akan memetakan dan memantau lingkungan yang berpotensi mengandung spora antraks.

Koordinasi Pemetaan Potensi Risiko Lingkungan Pada Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

Menindaklanjuti arahan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Anung Sugihantoro, M.Kes pada pertemuan koordinasi tindak lanjut pengendalian antraks di Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan di Hotel Mercure Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2020 dengan jajaran Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 20 Januari 2020 bertempat di Kantor Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta melaksanakan koordinasi terkait dengan pemetaan potensi risiko lingkungan pada kejadian antraks di Kabupaten Gunungkidul. Hadir pada kegiatan tersebut Dr. dr. Irene, MKM, selaku Kepala BBTKLPP Yogyakarta, Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi, Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium, Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan dan beberapa Pejabat Fungsional Teknis, sementara dari BB.Veteriner Wates diterima langsung oleh Kepala Balai Bagoes Poernadjaja.



Dalam materi koordinasi tersebut dibahas terkait rencana BBTKLPP Yogyakarta yang akan mengembangkan kemampuan Laboratoriumnya dalam hal pemeriksaan spesimen Antraks serta rencana tindak lanjut untuk mengembangkan dan melengkapi pemetaan risiko lingkungan terkait kejadian antraks di Kabupaten Gunungkidul yang terjadi pada pertengahan bulan Desember 2019 hingga pertengahan bulan Januari 2020 ini. Terkait dengan rencana pengembangan kapasitas Laboratorium pemeriksa antraks BB Veteriner Wates siap dan bersedia untuk memberikan pendampingan berupa memberikan transfer pengetahuan bagi Petugas dalam bentuk magang bagi petugas Pemeriksa, sementara untuk pengembangan pemetaan potensi risiko lingkungan terkait kejadian antraks di Kabupaten Gunungkidul disepakati untuk menambah titik ataupun lokasi pemantauan yang menurut hasil analisis di lapangan dipandang mempunyai potensi persebaran bagi spora antraks. Beberapa titik atau lokasi yang akan diambil sampelnya adalah pada daerah di sekitar kandang dan kuburan ternak yang dari hasil pemeriksaan sampel tanah sebelumnya diketahui positif antraks dan lokasi sawah yang diduga sebagai penampungan aliran air hujan terakhir sebelum meresap ke dalam tanah di sekitar kasus antraks yang terjadi saat ini. Untuk kegiatan pengambilan sampel tersebut akan dilaksanakan secara bersama-sama antara BBTKLPP Yogyakarta, BB Veteriner Wates dan pendampingan lapangan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Pertemuan Rekonsiliasi Dan Reviu Laporan Keuangan UAPPA/B Esselon 1 Ditjen P2P Ta 2019 (Satker, Kantor Pusat, dan Dekonsentrasi)



Pertemuan diselenggarakan oleh Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahunan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Esselon 1 (UAPPA/B E-1) TA 2019 di Bekasi tanggal 20 - 25 Januari 2020 yang disusun dan disampaikan secara berjenjang dengan kualitas yang lebih baik guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh petugas SAIBA, petugas SIMAK BMN dan PIPK. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan baru dengan menyediakan aplikasi berbasis web atau disebut e-Rekon-LK untuk kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan sehingga proses rekonsiliasi dapat dilakukan semua satuan kerja secara mandiri, terciptanya single database serta mempercepat proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga.

Materi pertemuan dimulai dengan Arahan Sekretaris Ditjen P2P, dr. Achmad Yurianto sekaligus membuka Pertemuan, Peranan APIP dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2019, Mekanisme Reviu LK Tahunan TA 2019, Evaluasi Laporan Keuangan TA 2018 dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan TA 2019, Update Aplikasi SAIBA dalam penyusunan LK Tahunan 2019, Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu Penata Laksana Barang serta Sosialisasi Permenkes 42 Tahun 2019.

Selanjutnya dilaksanakan desk LK dan penilaian laporan PIPK yang sudah menggunakan aplikasi e-PIPK. Setelah dilakukan review dan ada ketidaksesuaian maka dilakukan perbaikan. Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan oleh tim Itjen dilakukan melalui E-Reviu secara paralel dengan Desk LK dan PIPK oleh Tim Desk Eselon I. Terakhir Penyerahan IHR-CHR serta Berita Acara Penyerahan Data Laporan PIPK.

Pengambilan Sampel Lingkungan Dalam Rangka Pemantauan Lingkungan Penyakit Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

Diberitakan bahwa pada Bulan Desember 2019 s.d. Januari 2020 ada kasus Antraks di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit Antraks disebabkan oleh Bakteri *Bacillus Anthracis*. Bakteri *Bacillus Anthracis* dapat menginfeksi manusia maupun ternak baik dalam bentuk vegetative maupun dalam bentuk spora. Bakteri Antraks dalam bentuk vegetative berada dalam tubuh inang yang terinfeksi (ternak) dan begitu keluar ke lingkungan dan berinteraksi dengan udara maka vegetative tersebut akan membentuk spora sebagai bentuk pertahanan diri. Spora yang terbentuk tersebut dapat bertahan di lingkungan dan menginfeksi manusia berpuluh tahun kemudian. Karena itu penting untuk melakukan pemantauan lingkungan guna mengetahui keberadaan bakteri Antraks di lingkungan terutama di sekitar lokasi ternak mati mendadak yang dicurigai Antraks.



Sehubungan hal tersebut tim yang terdiri dari BBTCLPP Yogyakarta, BBVet Wates dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan pengambilan sampel lingkungan di beberapa titik yang menjadi tempat dilakukannya penyembelihan/pemotongan/pengolahan/ penguburan/pembuangan ternak yang diduga terjangkit Antraks serta media lingkungan di wilayah lain yang berpotensi tercemar bakteri Antraks disebabkan kondisi geografis wilayah seperti muara aliran air dari tempat yang diduga tercemar bakteri Antraks di Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan sampel dilakukan tanggal 22, 23 dan 24 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM, mengikuti secara langsung proses pengambilan sampel lingkungan. Diperoleh 5 sampel lingkungan terdiri dari 5 sampel tanah yang diambil di Kecamatan Semanu, Rongkop, Semin dan Gedangsari dan 2 sampel air sungai yaitu dari sungai seropan dan sungai Bribin. Selanjutnya sampel yang diperoleh diuji di laboratorium BBVet Wates Kulonprogo. Hasil pengujian sampel dengan metode kultur menunjukkan seluruh sampel negatif Bakteri *Bacillus anthracis* hidup. Kegiatan pemantauan direncanakan akan rutin dilakukan oleh lintas sector terkait untuk memastikan tidak ada spora penyakit Antraks di lingkungan.

Rapat Koordinasi/Konsultasi Kegiatan TTG Dan Sanitarian BBTCLPP Yogyakarta Dengan Dinkes Kota Sawahlunto, Sumatera Barat



Pada hari Jumat, 23 Januari 2020 Dinas Kesehatan Sawahlunto, Sumatera Barat berjumlah 10 orang berkunjung ke BBTCLPP Yogyakarta dalam rangka koordinasi / konsultasi kegiatan TTG dan Sanitarian. Kunjungan Dinas Kesehatan Sawahlunto dipimpin oleh Kasie Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Bp. Palakhi. Rapat koordinasi dilaksanakan di ruang rapat Lt. 5 Gedung Baru BBTCLPP Yogyakarta, Jl. Imogiri, Bantul.

Pertemuan dihadiri oleh kepala BBTCLPP Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, MKM, Kepala Bagian TU Ibu Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH, Kepala Bidang ADKL Ibu Feri Astuti, ST, MPH, Kasie. Lingkungan Fisik dan Kimia Bp. Tri Setyo Winaryanto, ST, MSc dan Kasie. Teknologi Pengendalian Penyakit Bp. Rudi Priyanto, Ssi.

Acara diawali dengan sambutan Kepala BBTCLPP Yogyakarta oleh Ibu Dr. dr. Irene, MKM. Dalam sambutannya disampaikan terimakasih atas kunjungannya dan ucapan selamat datang di kantor BBTCLPP Yogyakarta yang baru, dilanjutkan perkenalan personil BBTCLPP Yogyakarta serta memberikan penjelasan tentang sejarah sekaligus gambaran terkait tugas pokok dan fungsi BBTCLPP Yogyakarta.

Sambutan kedua disampaikan oleh Kasie Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Sawahlunto, Sumatera Barat Bp. Palakhi. Dalam sambutannya beliau mewakili seluruh tim menyampaikan terimakasih atas sambutan yang sangat berkesan yang diberikan oleh BBTCLPP Yogyakarta dan dilanjutkan menjelaskan maksud dan tujuan datang ke BBTCLPP Yogyakarta yang merupakan pengalaman pertama datang ke Yogyakarta. Dalam kunjungan ini diharapkan Dinkes Kota Sawahlunto dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan dapat membuka pikiran sehingga nantinya dapat mempraktekkan kepada masyarakat khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di BBTCLPP Yogyakarta dapat membantu permasalahan air yang ada di Pamsimas Sawahlunto dimana kekeruhan dan kesadahanannya yang tinggi.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke laboratorium – laboratorium yang ada di BBTCLPP Yogyakarta antara lain Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) dan Fisika Kimia Air.

Pertemuan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Keprotokoleran dan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Ditjend P2P



Pada tanggal 29-31 Januari 2020 bertempat di Bali Rani Hotel jl. Kartika Plaza Kuta, Kab. Badung Bali, dilaksanakan Pertemuan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan, Keprotokoleran dan PDLN di Lingkungan Ditjend P2P yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kepala BBTCLPP Yogyakarta (Dr.dr.Irene, MKM), menghadiri acara tersebut bersama Kasubbag Umum (Heni Amikawati) dan pengelola kearsipan (Kisniati). Acara dibuka pada hari Rabu, 29 Januari 2020 malam oleh sesditjen P2P yang diwakili oleh kepala KKP kelas I Denpasar (dr. H. Lucky Cahyono, M.Kes). Dalam sambutan pembukaan, disampaikan bahwa acara yang diikuti oleh seluruh satker dan UPT di P2P ini mempunyai output:

1. Pengaplikasian Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
2. Pemahaman prosedur perjalanan dinas luar negeri (PDLN)
3. Pemahaman tata cara keprotokoleran di lingkungan Kemenkes
4. Penerapan pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA),

sehingga dengan adanya acara ini akan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan baik kepada masyarakat umum maupun pada pegawai kemenkes.

Materi yang disampaikan antara lain:

1. Penerapan pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) disampaikan oleh ibu Noni (arsiparis di sub bagian TU dan RT P2P)
2. Tata cara keprotokoleran di lingkungan Kemenkes disampaikan oleh Fadli Adika (subbag protokoler Biro Umum Kemenkes)
3. Prosedur perjalanan dinas luar negeri (PDLN) disampaikan oleh Eva Erlina, S.S., MKM (kasubbag Administrasi Perjalanan Dinas Biro Umum)
4. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) disampaikan oleh Rosa Jaya, SKM, MKM (kasubbag Persuratan Biro Umum)

Setelah penyampaian materi selesai, dilakukan diskusi untuk membuat kesepakatan Rencana Tindak Lanjut. Acara ditutup oleh H. Ruslan Fajar, SKM (kepala KKP kelas II Banjarmasin) dengan pesan agar RTL yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik di satker/UPT di lingkungan P2P.

Peninjauan Dan Finalisasi Penyerahan Aset Pemda DIY



Menindaklanjuti rencana penyerahan kembali aset Pemda DIY yang digunakan BBTCLPP Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dilaksanakan pertemuan yang dihadiri Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI, Kepala Bagian Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal P2P, KPKNL, BPKA DIY, LANAL Yogyakarta, dan BBTCLPP Yogyakarta. Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M menyampaikan bahwa status pinjam pakai oleh BBTCLPP Yogyakarta adalah aset tanah dan bangunan PEMDA DIY yang dalam perjalanannya telah dilakukan

beberapa renovasi sesuai dengan kebutuhan tupoksi BBTCLPP Yogyakarta. Dalam proses pengembalian aset tanah dan bangunan diikuti proses hibah untuk penyerahan Asset Tetap Renovasi (ATR) serta aset tetap yang melekat berupa AC di ruangan.

Dalam pertemuan ini Kabiro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan RI Bapak Drs. Setyo Budi Hartono, M.M. menyampaikan arahan bahwa pada prinsipnya Kementerian Kesehatan akan menyerahkan aset yang statusnya pinjam dari Pemda. Proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga dapat terselesaikan secara clear dan clean agar tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari.

Bapak Eko Priyanto, S.H. dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY menyampaikan bahwa PEMDA akan mengikuti perjanjian yang ada, untuk penyerahan kembali pinjaman dan penyerahan hibah perlu berita acara yang melibatkan beberapa pihak.

Bapak Wahyu Rinaryadi dari KPKNL menyampaikan bahwa proses hibah untuk mempermudah mekanisme pengalihan aset. Proses di KPKNL cepat hanya beberapa hari karena ada pendelegasian kewenangan, yang penting bagi KPKNL adalah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam pertemuan ini disepakati jadwal pelaksanaan proses penyerahan aset dengan tahapan yang akan ditindaklanjuti bersama dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga disepakati beberapa hal berikut : Akan diserahkan kembali aset tanah dan bangunan beserta ATR dan aset tetap dari BBTCLPP Yogyakarta kepada Pemda DIY; Proses pelaksanaan secara teknis dilaksanakan mengikuti proses administrasi selesai; Tanggal administrasi terkait pinjam pakai setelah BAST hibah ditandatangani para pihak; Mulai tanggal 3 Februari 2020 BBTCLPP Yogyakarta sudah tidak menggunakan lagi Gedung Pemda kecuali ruang arsip dan Musholla lantai 2 dan melakukan pemagaran permanen (bagian belakang) dan non permanen (bagian depan); Dalam persiapan pemanfaatan Gedung oleh Lanal, perlu disiapkan sumur untuk pemenuhan air dan pemenuhan kebutuhan listrik; Pembayaran listrik terakhir oleh BBTCLPP Yogyakarta tanggal 20 Februari 2020; Mulai tanggal ditandatanganinya BAST Hibah terkait aset Lanal berkomunikasi dengan Pemda DIY c.q. BPKA DIY.

Pertemuan Persiapan Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Di Lingkungan Sekolah Di Kabupaten Kulon Progo DIY



Pada tanggal 27 Januari 2020, tim BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Seksi Lingkungan Biologi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.), dan Tim Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah BBTCLPP Yogyakarta (Anjas Wulansari, S.K.M., M.P.H. dan Yeni Yuliani, S.Tr.Kes.), serta Sanitarian Pengelola Penyehatan Lingkungan (Ita Latiana Damayanti, A.Md.K.L.) melaksanakan pertemuan koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Di Dinas Kesehatan, tim ditemui oleh Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Sugiarto, S.K.M., M.P.H., dan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Arief Musthofa, S.Si., M.Epid.

Diskusi mengarah pada kriteria pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan data kasus DBD atau keracunan makanan di sekolah dan didapatkan tiga wilayah Puskesmas dengan angka DBD yang tertinggi di Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil diskusi juga disepakati bahwa Dinas Kesehatan akan

menugaskan petugas Puskesmas untuk membantu pengambilan data vektor DBD di lingkungan sekolah pada saat pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel. Pertemuan persiapan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kulon Progo dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP (Jujur Santoso, S.Pd, M.Hum), dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF (Dra. Maryati), Kepala Seksi PDPK SD (Endah Dwi Lestari, S.Si., M.Ec.Dev.), Kepala Seksi PDPK SMP (Asmi Setyaingrum, S.Si), Kepala Seksi PDPK PAUD dan PNF (Nur Baniyati K, S.Pd), dan Priyono, S.Pd (PDPK SD). Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa ada kejadian sakit bersamaan dalam jumlah cukup banyak pada siswa SMP dan SD di Kab. Kulon Progo. Pada tahun 2019 terdapat kejadian sakit bersamaan dengan gejala demam dan muntah pada sejumlah siswa SMP (20 hingga 90 orang). Dengan pertimbangan tersebut, lokasi kegiatan diarahkan ke SD dan SMP dengan riwayat kasus tersebut. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu ke II dan III Februari 2020 dengan mempertimbangkan waktu belajar siswa SD dan SMP saat tidak ada latihan ujian.

Pertemuan Penguatan SDM Tenaga Kesehatan, Keswan dan Lintas Sektor Lainnya dalam Rangka Optimalisasi Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Penyakit Antrak di Kabupaten Gunungkidul

Pada Bulan Januari 2020 di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilaporkan adanya kasus antraks. Antraks merupakan penyakit yang jarang muncul dan tidak setiap tahunnya terjadi, namun kewaspadaan dan surveilans yang baik akan dapat mencegah terjadinya kesakitan ataupun kematian terhadap penyakit tersebut. Pertemuan penguatan SDM tenaga kesehatan, keswan dan lintas sektor dalam rangka optimalisasi kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul merupakan rangkaian tindaklanjut pengendalian kejadian penyakit antraks yang telah dilaksanakan Kementerian Kesehatan R.I., Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Penyelenggaraan kegiatan ini adalah Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Pertemuan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 28 - 29 Januari 2020. Pertemuan hari pertama dilaksanakan di Aula Germas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan pada hari kedua bertempat di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Gunungkidul. Peserta berjumlah 200 orang yang terdiri dari : dokter fungsional dan tenaga surveilans di puskesmas, klinik swasta dan dokter fungsional di UGD rumah sakit, Bagian Kesra Kabupaten Gunungkidul, BAPPEDA, Dinas Kesehatan se DIY, Dinas Pertanian dan



Pangan Kabupaten Gunungkidul, dokter hewan serta lintas sektor yang terkait. Pertemuan dibuka oleh Direktur P2PTVZ, Ditjen P2P, Kemenkes R.I., didampingi Kepala BBTKLPP Yogyakarta, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Dalam pertemuan ini hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, dr. Dewi Irawati, M.Kes. yang memaparkan bagaimana Situasi Antraks di Gunungkidul, serta Direktur P2PTVZ, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. dan Kasubdit Zoonosis, drh. Sitti Ganefa Pakki, M.Epid, yang menyampaikan mengenai Kebijakan Pengendalian Antraks. Selain itu pertemuan juga menghadirkan praktisi ahli antraks dari UNS Surakarta, dr. Dhani Rhedono, Sp.PD yang memaparkan mengenai Tata Laksana Penyakit Antraks (Deteksi dini dan Pengalaman Penanganan); Kepala Bidang Pelayanan Veteriner BBVet Wates, drh. Indarto Sudarsono, M.MT. yang menyampaikan mengenai Surveilans Antraks pada Hewan, dan Fungsional Epidemiologi dari Subdit Surveilans, Kemenkes R.I., Abdurrahman, S.K.M., M.Kes. untuk menyampaikan mengenai Surveilans Antraks pada Manusia.

Forum diskusi yang dibuka dalam pertemuan ini mendapat sambutan baik dari peserta pertemuan. Beberapa hal yang didiskusikan antara peserta dan narasumber ahli antara lain mengenai tata laksana kasus antraks pada manusia dan hewan, mekanisme penularan antraks, serta sharing pengalaman dalam penanganan kasus antraks yang ditemui baik dari bidang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan peternakan. Pertemuan ditutup oleh Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi BBTKLPP Yogyakarta, Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes. dengan harapan pertemuan bermanfaat dalam penanggulangan penyakit Antraks dan kasus berhenti dengan meningkatnya kewaspadaan dari seluruh lintas sektor dan lintas program terkait.

Persiapan Dan Pengumpulan Data Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Di Lingkungan Sekolah Di Kabupaten Wonogiri



Persiapan dan pengumpulan data Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik Kimia (Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc.) serta Tim Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah BBTCLPP Yogyakarta (Anjas Wulansari, S.K.M., M.P.H. dan Yeni Yuliani, S.Tr.Kes.). Di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, tim menemui Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Bapak Abdulah, S.E., M.M. beserta staf. Diskusi mengarah pada kriteria pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan data kasus DBD atau keracunan makanan di sekolah. Dinas Kesehatan menyampaikan masukan 3 wilayah puskesmas dengan angka kasus DBD tinggi yaitu : Puskesmas Wonogiri 2, Puskesmas Selogiri, dan Puskesmas Sidoharjo. Koordinasi dilanjutkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Wonogiri dengan didampingi oleh petugas Dinas Kesehatan.

Tim berdiskusi dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Bapak Sugino S.Pd. S.IP., M.Pd, Kepala Seksi Kurikulum Bapak Agung Budiyo dan Kepala Seksi Penjaminan Mutu Bapak Bambang Suwondo. Dengan mempertimbangkan kasus DBD dan diskusi bersama petugas Dinas Kesehatan yang mendampingi, kegiatan akan dilaksanakan di 3 wilayah Puskesmas antara lain: wilayah Puskesmas Wonogiri 2, Puskesmas Selogiri, dan Puskesmas Sidoharjo. Baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri siap membantu pelaksanaan pengambilan sampel Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah di Lingkungan Sekolah di Kabupaten Wonogiri yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020.

Rapat Koordinasi Persiapan Menghadapi Wabah Virus Corona Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah nomer : 005/00347 tanggal 27 Januari 2020, bertempat di Pusdalops PB Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2020, dilakukan Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov). Situasi saat ini walaupun belum ada kasus konfirmasi di Indonesia, nCov sudah menginfeksi lebih dari 14.000 orang dari 25 negara di dunia, sehingga kesiapsiagaan wilayah untuk menghadapi infeksi nCov dipandang perlu. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh stakeholder dalam kluster kesehatan, antara lain Dinas Kesehatan DIY, KKP, BBTCLPP Yogyakarta, RSUP Dr Sardjito, RSPAU Hardjolutito, PMI, dan RSP Respira Yogyakarta. Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan RSUP Dr Sardjito dan RSUD Panembahan Senopati sebagai rumah sakit rujukan di wilayah DIY.



Selain itu, dibahas pula mengenai penerapan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi 2019-nCov yang dikeluarkan oleh Dirjen P2P, terutama dalam hal alur deteksi dini dan respon di pintu masuk dan wilayah, dan peran dari berbagai stakeholder terkait. Dalam rapat disepakati bahwa Dinas Kesehatan DIY dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk membahas teknik pelaksanaan kesiapsiagaan menghadapi infeksi nCov secara lebih rinci.

Pertemuan Jejaring B/BTKLPP Se-Indonesia Untuk Membahas Standardisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, Serta Penetapan Layanan Unggulan Pada Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit

Pada tanggal 30 Januari 2020 dilaksanakan Pertemuan Jejaring B/BTKLPP Se-Indonesia untuk Membahas Standardisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana, serta Penetapan Layanan Unggulan Pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Pertemuan dibuka oleh Sesditjen P2P, dr. Achmad Yurianto. Dalam arahnya, beliau menyampaikan tentang Penguatan Peran, dan Fungsi B/BTKLPP dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Indonesia, dengan beberapa point arahan sebagai berikut:

- Institusi pemerintah memiliki empat mandat, yaitu:
 1. Mandat mengatur
 2. Mandat mengawasi
 3. Mandat membina
 4. Mandat melaksanakan. Mandat mengatur dilaksanakan oleh pusat dengan membuat NSPK untuk dilaksanakan. Mandat mengawasi dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan apakah bisa dilakukan atau tidak oleh pelaksana. Bila tidak bisa dilaksanakan, maka perlu dibina. UPT harus melaksanakan, bukan mengatur, mengawasi, dan membina. B/BTKLPP adalah unit pelaksana teknis dari pusat, dengan mandat utama adalah melaksanakan.



- Dalam melaksanakan tugas teknis, dibutuhkan keahlian, sehingga dibutuhkan jabatan fungsional. UPT Ditjen P2P paling lengkap. Jabatan teknis harus lebih unggul dibandingkan jabatan administrator di UPT. Pelaksana teknis diisi orang dengan kompetensi teknis dan mampu melayani masyarakat. Selain itu, UPT adalah sebagai penyelenggara fungsi P2P di kabupaten/kota, yang dalam hal ini menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan.
- Permasalahan kesehatan dalam masyarakat tidak dapat selesai dengan membuat aturan/pedoman, tapi dengan aksi dalam bentuk: saran tindak, rekomendasi, dan teknologi tepat guna.
- Beberapa permasalahan kesehatan yang diharapkan untuk dikaji atau ditindaklanjuti oleh UPT adalah:
 - Perubahan cuaca dapat berpengaruh ke kesehatan, misal melalui perubahan terhadap penyakit (diare, dll), kualitas air, dan vektor (jumlah vektor bertambah)
 - Infeksi Virus Corona
 - Infeksi Hepatitis A
 - Janji terhadap negara terkait prioritas nasional, misal: eliminasi Malaria, eliminasi Schistosomiasis, TBC

UPT hendaknya bertindak seperti zeni tempur dalam kesatuan militer, yaitu sebagai pengintai, memposisikan diri di barisan kesehatan paling depan dan memikirkan cara untuk mencapai tujuan kesehatan bagi seluruh pasukan. Permasalahan kesehatan dapat dipikirkan pemecahan masalahnya dengan cara sederhana.

- UPT hendaknya mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat di wilayah layanannya.
- Strategi nasional dalam memecahkan masalah kesehatan antara lain dengan melakukan: Penguatan cegah tangkal dan pemberdayaan masyarakat.
- UPT jangan hanya memberikan rekomendasi ke stakeholder, tapi memastikan rekomendasi dilaksanakan.

Selanjutnya disampaikan materi tentang Keputusan Direktur Jenderal P2P (Keputusan Dirjen P2P NO. H.K. 02.02/II/3130/2019) tentang Standardisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Penetapan Layanan Unggulan pada UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit oleh Bapak Ikbal dari Bagian Hukormas Ditjen P2P.

Setelah tanya jawab, dilakukan diskusi oleh peserta yang dibagi empat kelompok yaitu kelompok:

1. Instalasi dan pemenuhannya
2. Identifikasi SDM
3. Sarana, prasarana, dan pendukung
4. Sinkronisasi kegiatan. Hasil diskusi masing-masing kelompok dikumpulkan di eselon III BBTCLPP Jakarta untuk

Pada malam hari, dilakukan acara Serah Terima Jabatan Kepala BBTCLPP Jakarta dari Bapak Zainal Ilyas Nampira, S.K.M., M.Kes. kepada Ibu Naning Nugrahini, S.K.M., M.K.M., serta Serah Terima Jabatan Kepala BTKLPP Kelas 2 Ambon dari Bapak Martahan Sitorus, S.K.M., M.P.H., kepada Bapak Budi Santoso, S.K.M. M.P.H., dipimpin oleh Dirjen P2P, dr. Anung Sugihantono, M.Kes. Bapak Dirjen memberikan ucapan terima kasih kepada Kepala B/BTKLPP yg akan memasuki masa pensiun atas kerja dan bantuan selama bekerja. Selain itu diucapkan selamat kepada para Kepala B/BTKLPP yang baru, agar segera dapat bertugas di tempat yang baru. Kepada beberapa orang yang akan mengikuti seleksi pemilihan Kepala BBTCLPP Surabaya dan Banjarbaru, diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh BBTCLPP untuk dituangkan dalam tulisan dan paparan saat seleksi nanti. Disampaikan juga bahwa Kepala B/BTKLPP harus memiliki ide-ide untuk memecahkan masalah kesehatan dengan melibatkan semua stakeholders di wilayah layanan.

Upaya Sinergi Kemkes RI melalui BBTCLPP Yogyakarta dan BNPB dalam Kesiapsiagaan Bencana

YOGYAKARTA - Rapat Kerja Kementerian Kesehatan RI melalui Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menghadirkan BNPB Direktorat Kesiapsiagaan dengan tema Peran BBTCLPP Yogyakarta dalam Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana pada Jumat (31/01).

Direktur Kesiapsiagaan BNPB Johnny Sumbang, pejabat struktural internal dan pejabat fungsional teknis epidemiologi, sanitarian, dan PLK di BBTCLPP Yogyakarta, serta perwakilan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 4 Yogyakarta hadir dalam kegiatan tersebut.



cara dibuka oleh Dian Trikoriati di lantai tiga Aula Gedung BBTCLPP Yogyakarta, Jl. Wiyoro Lor, ia menyampaikan bahwa bencana di era sekarang ini sangat dahsyat dan merugikan secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

"Acara ini penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana" pungkas Trikoriati sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BBTCLPP Yogyakarta.

Empat pokok bahasan yang disampaikan Direktur Kesiapsiagaan yaitu :

1. Kerentanan Indonesia terhadap Risiko Bencana (Geologi, Hidro-meteorologi, Pencemaran Lingkungan, Dampak terhadap Kesehatan)
2. Sebaran Penyakit (Kasus Corona Virus dan Respon)
3. Substansi Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, Kimia
4. Rencana Aksi Bidang Pencegahan dan Respons (Darurat).

"Indonesia berada di wilayah dengan potensi bencana alam berupa gempa, tsunami, gunung berapi, dan perubahan iklim. Selain bencana alam, Indonesia juga berpotensi mengalami bencana non alam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan dan lahan, penambangan ilegal, pengerukan sungai, penggundulan hutan, pencemaran air dan tanah, degradasi lahan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kabut asap, dan KLB penyakit" Papar Johny.

Ditambahkan pula bahwa BBTCLPP Yogyakarta dapat berperanimbang antara bencana alam dan bencana non alam. **"Apabila terjadi permasalahan lingkungan di wilayah kerja, BBTCLPP Yogyakarta dapat menggandeng BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD D.I. Yogyakarta. BPBD memiliki kewenangan dalam menangani bencana non alam seperti bencana akibat pencemaran lingkungan"** Jelas Johny.

Contoh kasus di Kabupaten Tegal ketika ada laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tentang pembuangan limbah padat di lahan perkebunan berupa briket yang tidak diketahui kandungannya dalam jumlah cukup banyak. Dalam kasus ini BBTCLPP Yogyakarta dapat menggandeng BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Tegal untuk melakukan investigasi.

Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2019 BPBD bertugas untuk menetapkan indikator penetapan status dan tingkat bencana termasuk menjadi koordinator pendirian posko dan BBTCLPP Yogyakarta dapat berperan sebagai anggota posko. Terkait pembiayaan penanganan darurat bencana ada dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Apabila ada kasus bencana dan BBTCLPP Yogyakarta tidak memiliki dana untuk melakukan aksi karena keterbatasan dana, BBTCLPP Yogyakarta dapat mengajukan anggaran ke Kementerian Kesehatan dan BPBD ataupun BNPB.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Mobilisasi Klaster Kesehatan di BBTCLPP Yogyakarta yang dibuat bersama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan oleh Feri Astuti. Dalam SOP tersebut BBTCLPP Yogyakarta berperan membentuk Tim Tanggap Darurat. Masukan dari Bapak Johny agar memasukkan BPBD dalam SOP tersebut. **"jangan lupa dimasukkan BPBD dalam SOP tersebut"** ujar Johny.

Materi lain dari BPBD Kabupaten Bantul mengenai evakuasi dan kebakaran sehubungan dengan Gedung baru BBTCLP Yogyakarta dengan peralatan lebih canggih yaitu Bio safety level 2 untuk pemeriksaan penyakit seperti flu burung, difteri dan faktor resiko lingkungan.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari BNPB kepada BBTCLPP Yogyakarta berupa buku-buku peraturan tentang kebencanaan dan kedaruratan. Acara ditutup oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. IRENE, M.K.M di BBTCLPP Yogyakarta kantor Imogiri Timur.

Sosialisasi Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007).

Untuk mengetahui bagaimana mengatasi jika terjadi bencana maka pada tanggal 31 Januari 2020 diadakan Sosialisasi dari BPBD. Acara dilaksanakan di gedung BBTCLPP Yogyakarta, Jl. Imogiri Timur Km. 7,8 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul yang dihadiri oleh pejabat struktural, personil laboratorium, Instalasi Pelayanan Teknik, Instalasi Sarana Prasarana dan Satpam. Narasumber dari BPBD Kabupaten Bantul, Ibu Wahyu Nur Rofi dan Bapak Muh. Khamdani.



Materi pertama disampaikan oleh Ibu Wahyu Nur Rofi. Terlebih dahulu diperkenalkan tentang BPBD yang terdiri dari tiga satuan tugas yaitu Pusdalops, PBK/Damkar dan Tim Reaksi Cepat (TRC). Pusdalops bertugas mengendalikan semua pelayanan yang ada di BPBD. Nomor emergency yang bisa dihubungi adalah 112. Pusdalops siap siaga 24 jam, 7 hari.

PBK/Damkar di Bantul ada 7 pos yaitu di Kasihan, Banguntapan, Imogiri, Sumuran (pos induk), Sedayu, Pundong, dan Piyungan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim BPBD di gedung laboratorium, ancaman yang mungkin timbul adalah gempa bumi (sesuai dengan kajian wilayah) dan kebakaran (bisa timbul dari peralatan laboratorium, bahan-bahan kimia, sistem perpipaan gas). Kerentanan yang dimiliki adalah kerentanan (struktural dan non struktural), kapasitas (struktural dan non struktural). Ancaman akan mempunyai risiko tinggi jika kerentanan tinggi dan kapasitas rendah.

1. Struktural

- Pintu otomatis, sign jalur bebas hambatan
- Pintu darurat, alternatif pintu dari pintu otomatis
- 70% ruangan lantai berbahan kaca dan partisi, diletakkan furniture atau benda keras yang dimungkinkan untuk berlindung ketika terjadi kondisi darurat
- Perkuatan tangga darurat

2. Non Struktural

- Penyusunan rencana kontingensi
- Pelatihan teknik penyelamatan untuk karyawan
- Simulasi
- Penyusunan SOP masing-masing bagian/lantai

Tanda-tanda yang harus dipasang : jalur evakuasi dan larangan meletakkan barang-barang di tempat-tempat sarana emergency (jalur evakuasi, APAR, Assembly Point).

Paparan kedua oleh Bapak Muh. Khamdani tentang Sistem Proteksi Kebakaran Gedung. Yang harus disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana : sarana penyelamatan jiwa (koridor, pintu darurat, tangga darurat, ramp, tanda petunjuk arah, genset), proteksi kebakaran pasif (misalnya: sistem kompartemensi, sarana dan sistem pengendali asap dan api, pemilihan material gedung), proteksi kebakaran aktif (sistem deteksi dini, proteksi kebakaran api awal, proteksi penyebaran kebakaran), akses pemadam kebakaran, denah sistem manajemen gedung, membentuk tim penanggulangan kebakaran gedung, membuat rencana penanggulangan keadaan bahaya kebakaran, pelatihan dan simulasi kebakaran serta pengujian sarana proteksi kebakaran secara berkala.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan semua pegawai paham apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Meskipun tidak diharapkan tetapi kita harus selalu siap. Rekomendasi yang disampaikan BPBD akan segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan keamanan gedung laboratorium.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Terkait Kejadian Antraks Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020



Sehubungan adanya kejadian antraks di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada pertengahan bulan Desember 2019 hingga awal bulan Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi IV melakukan kunjungan Kerja Spesifik untuk melihat dan meninjau secara langsung kondisi wabah antraks khususnya pada hewan ternak. Kunjungan komisi IV yang dipimpin oleh Ketua Komisi Bapak Sudin, SE ini diikuti oleh sebanyak 19 anggota dari 8 Fraksi dan 3 orang dari sekretariat Komisi. Dalam kunjungan kerja tersebut Komisi IV beserta rombongan diterima langsung di rumah Dinas Bupati oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul beserta jajaran OPD terkait. Pada kesempatan tersebut telah dipaparkan terkait situasi terakhir dan upaya pengendalian antraks pada hewan dan manusia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul.

Seusai paparan acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Wakil Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sesuai fungsinya dalam pengawasan program pemerintah, berupaya untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan mendesak yang didorong dan telah disetujui dan memungkinkan bisa difasilitasi oleh Kementerian terkait disampaikan oleh Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai ketua rombongan Kementan, dan Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) adalah permintaan Rumah Potong Hewan yang belum ada di Kabupaten Gunungkidul serta bantuan ternak bagi masyarakat yang ternaknya mati.

Pada kesempatan terakhir Komisi IV DPR RI juga memberikan kesempatan kepada Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Dr.dr. Irene MKM melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah antraks di Gunungkidul sejak mengetahui adanya informasi antraks di Kabupaten Gunungkidul, bahkan beberapa waktu sebelumnya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (dr. Anung Sugihantoro, M.Kes) sudah bertemu secara langsung dengan Bupati Gunungkidul untuk memberikan masukan terkait langkah pengendalian yang akan dilakukan. Dalam upaya pengendalian antraks tersebut disampaikan tiga upaya kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian antraks yaitu terkait penanganan pada manusia, hewan dan lingkungannya. BBTCLPP Yogyakarta bersama dengan BBVeteriner Wates telah memetakan faktor risiko di lingkungan dengan melakukan pemetaan potensi antraks di lingkungan dan telah melakukan upaya peningkatan Kapasitas SDM sebanyak 200 petugas terkait dengan penanganan Antraks baik pada manusia maupun hewannya, dalam ikut berkontribusi bersama instansi terkait lainnya dalam konsep one health untuk penanganan ketiga permasalahan tersebut secara bersama-sama.

Mengakhiri diskusi, Bupati Gunungkidul sangat berharap komunikasi dengan DPR RI akan selalu bisa dibina sehingga segala permasalahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul akan selalu mendapatkan perhatian serta berharap bahwa kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul tidak memberikan dampak perekonomian bagi Kabupaten Gunungkidul terutama di sektor pariwisata.

Assesment Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta oleh Komite Akreditasi Nasional



Pada tanggal 3 – 4 Februari 2020 telah dilakukan Survailen II Laboratorium Penguji dan Survailen tidak terjadwal (verifikasi lapangan) Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Survailen dilakukan oleh Tim Asesor yaitu Ibu Herlin Rosdiana, Bapak Nur Wachid, Bapak Yuli Purwanto, Ibu Eti Sumiati, Ibu Rina Aprishanty, dan Ibu Efadeswarni. Pada acara itu juga mendapatkan kunjungan monitoring dari Sekjen KAN drs. Kukuh S. Achmad, MSc. Tujuan Survailen ini adalah untuk melihat kesesuaian dokumen sistem mutu dan implementasinya dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan memverifikasi perubahan lokasi guna mempertahankan status akreditasi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM. Diharapkan agar Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta bisa mempertahankan status akreditasinya. Setelah itu disampaikan tujuan survailen dan dilanjutkan tinjauan ke laboratorium oleh Tim Asesor. Hasil dari surveilan ini adalah

Laboratorium telah berupaya untuk menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan konsisten, namun dalam operasinya masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian terkait Personel; Peralatan; Ketertelusuran Metrologi; Kaji Ulang Permintaan, Tender dan Kontrak; Pemilihan, Verifikasi dan Validasi Metode; Pengambilan Contoh; Rekaman Teknis; Pemastian Keabsahan Hasil; Pelaporan; Pengendalian Rekaman dan Audit Internal. Tim assesment akan merekomendasikan agar status akreditasi tetap diberikan, bila seluruh ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dengan baik dan berstatus memenuhi, dalam waktu yang telah disepakati.

Acara ditutup oleh Kepala BBTKLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM. Dalam penutupannya diucapkan terima kasih kepada Tim Asesor yang telah mengases dan memberikan masukan. Laboratorium Penguji dan Kalibrasi BBTKLPP Yogyakarta akan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan waktu yang telah disepakati guna mempertahankan status akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017.

Pembahasan dan Penelaahan Usulan Perencanaan Anggaran Pembahasan dan Kegiatan Program P2P TA. 2021



Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Pembahasan dan Penelaahan Usulan Perencanaan Anggaran Kegiatan Program P2P T.A. 2021. Penyelenggaraan kegiatan dibagi dalam dua regional, yaitu regional Barat dan Timur. BBTCLPP Yogyakarta menjadi peserta regional Barat yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 3 s.d. 7 Februari 2020. Pertemuan dihadiri oleh peserta Satuan Kerja (Satker) Pusat, 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Dekonsentrasi dari 18 Provinsi. Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr Irene, MKM menghadiri acara ini bersama Kepala Bagian TU dan Kepala Sub Bagian Program dan Laporan beserta tim perencananya.

Pada kesempatan ini Sesditjen P2P yang diwakili Kabag PI memberikan arahan atas beberapa hal terkait peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan perencanaan dan anggaran tahun 2021. Semua satker dapat menyusun perencanaan yang fleksibel yang dapat mengantisipasi peristiwa/masalah yang terjadi. Selain itu, ditegaskan agar satker benar-benar memperhatikan program prioritas nasional tanpa mengesampingkan prioritas bidang.

Pada kesempatan ini, narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes memaparkan kebijakan umum perencanaan dan anggaran Kemenkes tahun 2021, yang dilanjutkan dengan refreshing tentang implementasi e-Renggar dalam penyusunan usulan perencanaan tahun 2021.

Setelah arahan dan pemaparan oleh narasumber, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti proses desk dengan Unit Utama melalui verifikasi tentang pemenuhan dan kesesuaian usulan kegiatan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan terkait.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari proses penyusunan perencanaan yang baik kedepannya, sehingga diperoleh perencanaan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacingan

Filariasis yang sering disebut penyakit kaki gajah adalah penyakit zoonosis menular dan menahun yang disebabkan oleh cacing filaria. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening dan menyebabkan infeksi yang berakibat terjadinya elefantiasis berupa pembesaran tungkai bawah (Khaki), sehingga secara awam dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Indonesia termasuk Negara endemis Filariasis, terdapat 239 dari 511 kabupaten/kota di Indonesia yang endemis filariasis (Kemenkes, 2015). Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 118 kabupaten/kota telah dinyatakan eliminasi filariasis. Di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah kerja Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta terdapat 9 kabupaten/kota yang endemis filariasis dan sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada yang eliminasi. Untuk meningkatkan kualitas evaluasi Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan dibutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak terkait baik dalam dukungan teknis maupun pendanaan.



Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) melalui Subdit Filariasis dan Kecacingan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) menyelenggarakan **“Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacingan”** di Hotel Aloft Jakarta tanggal 11-14 Februari 2020. Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) melalui Subdit Filariasis dan Kecacingan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) menyelenggarakan **“Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka**

Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacingan” di Hotel Aloft Jakarta tanggal 11-14 Februari 2020. Pertemuan dihadiri perwakilan dari 10 B/BBTKLPP se Indonesia dan 9 Badan/Balai Besar/Balai/Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dari seluruh Indonesia. Dari BBTKLPP Yogyakarta hadir Kasie Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env, Supervisor kegiatan Filariasis dan kecacingan, Heldhy B Kristiyawan, SKM., M.Eng dan Perencana, Mardiansyah, S.Kom., M.P.H. Acara dibuka oleh Kasubdit Filariasis dan Kecacingan, Lita Renata Sianipar, SKM., M.Epid. Disampaikan bahwa proses evaluasi POPM butuh keterlibatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak hanya UPT Ditjen P2P tetapi juga UPT Puslitbangkes. Untuk itu diselenggarakanlah pertemuan ini agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas kegiatan evaluasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan.

Pertemuan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibagi dalam tiga sesi, yaitu sesi satu adalah materi mengenai program yang disampaikan oleh narasumber dari pusat dengan judul materi yaitu Strategi Percepatan Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan di Indonesia disampaikan Kasubdit Filariasis dan Kecacingan, judul materi Tahapan Monitoring dan Evaluasi Filca dan Dukungan B/BBTKLPP dan Balai Litbang yang disampaikan oleh Kasie Filariasis dan kasie Kecacingan serta materi dukungan anggaran dalam program penanggulangan Filariasis yang disampaikan Kabag PI. Sesi dua mengenai Dukungan B/BBTKLPP terhadap Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan Tahun 2019-2020 yang disampaikan oleh perwakilan dari 10 B/BBTKLPP Se-Indonesia. Sesi 3 yaitu Dukungan Badan/Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes dari seluruh Indonesia terhadap Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan Tahun 2019-2020 yang disampaikan oleh perwakilan dari 9 Badan/Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes dari seluruh Indonesia. Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan Desk kegiatan dan anggaran oleh Subdit Filariasis dan Kecacingan terhadap B/BBTKLPP untuk memastikan kegiatan wajib dalam rangka evaluasi POPM sudah dianggarkan/diusulkan. Hasil Desk BBTKLPP Yogyakarta merekomendasikan bahwa kegiatan Pre-TAS di 3 kabupaten (Blora, Pati dan Pekalongan) tahun 2020 agar diselenggarakan sesegera mungkin (Juni-Juli) sehingga hasilnya segera diketahui dan jika kegiatan Pre-TAS berhasil dapat diusulkan kegiatan lanjutan berupa TAS-1 di tahun anggaran 2021.

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Pada Embarkasi Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah



Pada tanggal 13 Februari 2020, tim BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Seksi Lingkungan Fisik dan Kimia, Tri Setyo Winaryanto, S.T., M.Sc melaksanakan kegiatan pengumpulan data ke Asrama Donohudan Kabupaten Boyolali. Petugas BBTCLPP Yogyakarta diterima oleh Kepala Seksi, Joko Pujiyono, SE., M.Si, berdiskusi tentang persiapan dalam rangka menyambut pelaksanaan haji tahun 2020, pada kesempatan ini pihak pengelola asrama memerlukan informasi / masukan instansi terkait,

baik sarana maupun pra-sarana untuk perbaikan fasilitas yang layak dalam kesiapan pelayanan pelaksanaan haji tahun 2020. Pada kesempatan ini petugas BBTCLPP Yogyakarta melanjutkan mengikuti pertemuan Pemantauan Hygiene dan Sanitasi Asrama Haji Donohudan Pra Embarkasi yang bertempat di Ruang VIP Madinah Asrama Donohudan Boyolali yang diselenggarakan oleh KKP Semarang.

Pertemuan dibuka oleh Kepala KKP Semarang, dr. Aryanti, M.M., M.K.M dilanjutkan sambutan dari

Kepala Pusat Kesehatan Haji yang diwakili oleh Bapak Maman H serta sambutan dari Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P yang diwakili oleh Bapak Edi Prianto. Dalam kesempatan ini kepala KKP Semarang memaparkan hasil pemantauan Hygiene dan Sanitasi Asrama Haji Donohudan. Setelah itu dilakukan pembagian kuesioner pedoman pemantauan dan hygiene sanitasi Asrama Haji Donohudan sebagai alat cek kondisi lapangan. Peserta melaksanakan cek lapangan dan hasilnya kemudian disampaikan setelah Ishoma.

Berdasarkan hasil cek lapangan, didapatkan ada beberapa temuan yang kurang layak, dan selanjutnya dibuatkan berita acara sebagai bahan laporan ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan masukan tersebut dapat ditindaklanjuti perbaikan sarana dan pra-sarana sebelum embarkasi haji tahun 2020.

Pengambilan Data Lingkungan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB/Wabah Di Lingkungan Sekolah Kabupaten Kulon Progo



Pada tanggal 13,17 dan 20 Februari 2020 dilaksanakan Pengambilan data lingkungan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB Wabah di Lingkungan Sekolah Kabupaten Kulonprogo. Kegiatan dilaksanakan di enam sekolah yaitu SDN Darat, SDN Bugel, SDN 3 Kalipetir, SMPN 3 Wates, SMPN 1 Panjatan, dan SMPN 2 Pengasih, yang dilakukan oleh tim kajian dari Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta bersama dengan petugas Puskesmas pada masing-masing wilayah layanan puskesmas yaitu Puskesmas Wates, Puskesmas Panjatan, dan Puskesmas Pengasih.

Pengambilan data lingkungan dilakukan dengan pengambilan sampel makanan dan minuman jajanan yang tersedia di kantin sekolah dan di jajakan pedagang makanan keliling di sekolah serta usap tangan penjamah makanan untuk diperiksa kandungan bakteri patogennya. Selain itu juga dilaksanakan survei breeding place dan resting place dan penangkapan larva dalam container-container di lingkungan sekolah yang selanjutnya diidentifikasi spesiesnya di Laboratorium Entomologi BBTCLPP Yogyakarta. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan observasi lingkungan sekolah dan wawancara dengan penanggungjawab sekolah perihal kondisi umum maupun kondisi khusus yang terkait dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan sekolah.

Konsolidasi Petugas Satuan Pengamanan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Pelanggan dan Keamanan di BBTCLPP Yogyakarta

Pada hari Senin, 17 Februari 2020, diselenggarakan pertemuan Konsolidasi Satuan Pengamanan BBTCLPP Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M

Tujuan diselenggarakannya pertemuan adalah dalam rangka Peningkatan Pelayanan pada Pelanggan dan Keamanan di BBTCLPP Yogyakarta. Pertemuan dilaksanakan di Aula Lt. 3 Barat BBTCLPP Yogyakarta yang dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari manajemen BBTCLPP Yogyakarta yaitu Kepala Bagian TU, Kabid SE, Kabid PTL dan Kasubbag Umum serta manajemen PT. Inti Sarana Wijaya, petugas satuan keamanan PNS dan petugas satuan keamanan Outsourcing.

Bapak Heru Busono selaku management PT. Inti Sarana Wijaya menyampaikan hak dan kewajiban bagi petugas satuan keamanan yang berada di bawah tanggungjawab management PT. Inti Sarana secara detail.



Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat lebih terjalin kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan pelayanan pelanggan dan pengamanan kantor BBTCLPP Yogyakarta.

Dalam pesannya, kepala BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan bahwa BTKLPP sudah berkontrak dengan PT. Inti Sarana Wijaya sehingga dalam pelayanan pelanggan dan keamanan kantor akan dilakukan kolaborasi antara petugas satuan keamanan PNS dan petugas satuan keamanan yang berada di bawah manajemen PT. Inti Sarana Wijaya sebagai koordinator ditunjuk bapak Sugeng HS yang merupakan petugas satuan keamanan PNS BBTCLPP Yogyakarta, selanjutnya segera dibuat jadwal jaga satuan petugas keamanan yang diketahui oleh kasubbag Umum. Untuk ketertiban kehadiran semua petugas untuk rekam data dalam finger print yang akan dievaluasi oleh koordinator dan manajemen PT. Inti Sarana Wijaya.

Konsolidasi Tenaga Cleaning Service dalam Rangka Peningkatan Kebersihan dan Keindahan di BBTCLPP Yogyakarta

Pada hari Senin, 17 Februari 2020 Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, M.K.M memimpin Rapat Konsolidasi Tenaga Cleaning Service dalam rangka Peningkatan Kebersihan dan Keindahan di BBTCLPP Yogyakarta. Rapat dihadiri 30 Orang yang terdiri dari manajemen BBTCLPP Yogyakarta, management PT. GunaAdi Graha dan semua *cleaning service*.

Rapat dibuka oleh Ka.Bag TU Dian Trikoriati, ST., SKM., MPH. Menyampaikan bahwa rapat ini untuk perbaikan kinerja CS. Apabila ada personil yang tidak bisa diperbaiki kinerjanya, pihak vendor dapat memberhentikan agar perform perusahaan dapat terjaga. Pihak vendor agar memberikan pembagian tugas tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing personil. Sebaiknya dibuat cek list kepuasan atas pekerjaan CS.

Ibu Indah selaku PT. Guna Adi Graha menyampaikan bahwa supervisor yang bertugas adalah Bp. Edi dan vendor sudah menyerahkan semua peralatan ke pihak BBTCLPP Yogyakarta. Belanja barang dan bahan pembersih/chemical dilakukan setiap 3 bulan sekali kemudian diserahkan kepada penerima barang.

Dalam arahannya kepala BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan bahwa pengadaan alat dan bahan kelengkapan CS untuk segera dibelikan agar ruangan di kantor harum. Adanya 2 orang CS perempuan ditugaskan di ruang kepala untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Semua petugas CS bertanggung jawab.



Surveilans Perilaku Vektor Dan Konfirmasi Vektor DBD Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Berawal dari penemuan kasus pertama positif Dengue dalam kegiatan S3D di RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi Grobogan dengan pemeriksaan RDT NS1, BBTCLPP Yogyakarta segera menindaklanjuti dengan survei perilaku vektor dan konfirmasi vektor DBD di sekitar rumah kasus. Kegiatan dimulai dengan pengumpulan data pada tanggal 17-18 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Puskesmas Purwodadi I, dan Kelurahan Purwodadi. Berdasarkan data kasus DBD yang diperoleh, ditentukan lokasi kegiatan survei vektor dilakukan di delapan RW di Kelurahan Purwodadi yang pernah terdapat penderita DBD dalam kurun waktu tahun 2019-2020, yaitu RW 01, RW 07, RW 13, RW 15, RW 17, RW 20, RW 21, dan RW 23. Di masing-masing RW dipilih rumah penderita untuk dilakukan survei vektor serta 12 rumah di sekitarnya dipilih secara random, kecuali pada kasus penderita terbaru yang ditemukan positif RDT NS1 pada bulan Februari 2020, survei vektor dilakukan di rumah penderita dan 12 rumah terdekatnya.

Survei pertama tanggal 19-20 Februari 2020 dilakukan di empat RW (RW 01, RW 07, RW 13 dan RW 15), dimulai dengan briefing dan penjelasan teknis kepada para kader, petugas puskesmas dan petugas Dinas Kesehatan tentang cara survei larva vektor DBD, penangkapan larva, penangkapan nyamuk dewasa serta cara pengisian formulir. Survei dilakukan oleh 16 orang terdiri 4 tenaga dari BBTCLPP Yogyakarta, 1 petugas Dinkes, 3 petugas puskesmas dan 8 kader yang terbagi dalam 8 tim, masing-masing tim ditemani oleh 1 kader. Kader melakukan survei larva, penangkapan larva, serta mengisi formulir. Sementara itu, petugas BBTCLPP Yogyakarta, dinas kesehatan, dan petugas puskesmas melakukan penangkapan nyamuk dewasa *Aedes sp.* dan mengisi formulir. Jentik yang ditemukan di tiap rumah dipisahkan antara jentik di dalam dan di luar rumah, serta dibedakan menurut jenis kontainer. Kemudian jentik dikelompokkan tiap RW, dibagi menjadi dua pool (dalam dan luar rumah) sehingga total berjumlah 8 pool jentik. Begitupun untuk nyamuk dewasa yang tertangkap, dibagi juga menjadi dua pool di tiap-tiap RW (penangkapan di dalam atau luar rumah) sehingga total pool nyamuk dewasa sebanyak 8 pool. Selanjutnya, pada tanggal 24-25 Februari 2020 survei dilanjutkan di empat RW lainnya yaitu RW 17, RW 20, RW 21, dan RW 23 dengan pola yang sama.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Program P2P Tahun 2020



Pada tanggal 24 sd 28 Februari 2020, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti Rakontek P2P 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala BBTCLPP (Dr. dr. Irene, MKM, Kepala Bagian Tata Usaha (Dian Trikoriati, ST, SKM, MPH), Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi (Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes), Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc) dan Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (Feri Astuti, ST, MPH). Acara pertemuan Rakontek P2P 2020 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen P2P (dr. Achmad Yurianto). Dalam laporannya disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini sebagai upaya koordinasi dan integrasi program P2P guna percepatan pelaksanaan tahun 2020 dan perencanaan tahun 2021, serta menindaklanjuti Rakerkesnas 2020. Peserta Rakontek P2P 2020 terdiri dari : Kepala B/BTKLPP, Kepala KKP, Kepala Dinkes Propinsi, Kabid P2 Dinkes Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Struktural di Lingkungan P2P.

Setelah laporan dari penyelenggara, dilanjutkan dengan sambutan/arahan serta pembukaan secara resmi oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (dr. Anung Sugihantono, M.Kes) dalam sambutannya disimpulkan bahwa : Pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi bagian intergrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Kebijakan operasional dalam Pencegahan dan pengendalian penyakit diarahkan untuk penyelesaian penyakit menular dan tidak menular serta kematian Ibu, kematian bayi, dan stunting dengan pendekatan Promotif Preventif di setiap jenjang pelaksanaan pemerintah, Evaluasi capaian program dilakukan secara holistik dan komprehensif untuk dijadikan pijakan perencanaan program berikutnya, Diperlukan inovasi inovasi daerah sesuai dengan spesifik lokal. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi.

Adapun materi dan beberapa hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Rakontek P2P 2020 sebagai berikut : Pembangunan Kesehatan 2020 – 2024, Pelaksanaan Pembangunan di Daerah, Integrasi pelaksanaan program, Penajaman program (HIV AIDS, TBC, Malaria, PTM), Talk Show Hasil penajaman program, Diskusi dan RTL Dinkes (Perencanaan DAK program P2P TA 2021 dan Cara perhitungan indikator SPM program P2P), Diskusi RTL UPT Rakordit Paripurna (Sosialisasi Kepdirjen ttg Standarisasi B/BTKLPP dan KKP, serta PP 6/2019), P2P Update (Evaluasi pelaksanaan karantina orang terpapar COVID-19, Pelaksanaan cegah tangkal COVID-19 di pintu masuk Negara, Pembelajaran karantina orang dari daerah episenter COVID-19 di Natuna, Pembelajaran karantina wilayah di provinsi NTB), P2P Update 2 (Surveilans COVID-19, Strategi menghadapi Hoaks kesehatan, Mekanisme pemeriksaan laboratorium COVID-19). Untuk RTL dalam Rakontek 2020 yaitu hasil Rakontek 2020 telah dibuat dalam bentuk poin-point yang akan dioperasionalkan lagi dalam Rakontek provinsi. Selain itu dalam Rakontek P2P 2020 diakan juga test kebugaran, test PTM dan pameran yang diikuti oleh BBTCLPP memamerkan produk produk TTG, KKP, Direktorat P2PTM, Direktorat P2PTVZ, Direktorat Surkakes dan Direktorat P2MKJN

Pertemuan di tutup oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (dr. Anung Sugihantono, M.Kes) dengan arahan penutupan sebagai berikut : semua telah dapat berkontribusi untuk memenuhi tujuan dari rapat koordinasi ini. Apa yang telah kita rumuskan bersama yang nanti akan jadi instrument di dalam penyusunan rencana aksi di daerah mari kita kerjakan, kita tindaklanjuti bersama sama, jangan sudah lengkap, sudah bagus, detail tapi tidak ada kelanjutannya. Hambatan dan tantangan perlu diselesaikan dengan koordinasi dan sinergi serta saling pro aktif. Rujukan, benchmark penentuan target adalah angka nasional, *Making Delivered*. Gaungkan lagi gunakan cara baru, metode baru, Gunakan segala sumber daya, teknologi informasi bahkan media sosial. Dokumentasikan dengan baik. Tetap optimis. Teguhkan Niat, lakukan dengan kesungguhan, jernih dan selalu berpikir rasional, kerjakan dengan ikhlas semata - mata mengharap ridho dari Allah SWT.

Rapat Koordinasi Dan Pencanaan SP 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari Rabu Pahing, 26 Februari 2020 bertempat di Gedung Pracimasono Kompleks Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dan Pencanaan Sensus Penduduk 2020 Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan rapat koordinasi antara lain untuk : 1) mensosialisasikan kegiatan sensus penduduk 2020, 2) mengkoordinasikan pelaksanaan sensus penduduk 2020, 3) Pencanaan SP2020 secara online dan 4) Pengisian Sensus Penduduk secara On Line. Acara ini diikuti oleh 211 peserta, dari BBTCLPP Yogyakarta dihadiri oleh Kasie Lingkungan Fisika dan Kimia (Tri Setyo Winaryanto, ST, M.Sc) dan Kasubbag Umum (Heni Amikawati, SKM).

Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah D.I.Yogyakarta (Bapak Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji) yang membacakan sambutan Gubernur D.I Yogyakarta menyampaikan bahwa mengapresiasi sensus Penduduk 2020 karena berbeda dari yang sebelumnya. Sensus Penduduk yang ke 7 ini dapat dilaksanakan mandiri secara on line mulai tanggal 15 Februari s.d 31 Maret 2020 dan yang belum registrasi secara on line akan didatangi oleh petugas untuk wawancara pada tanggal 1 s.d 31 Juli 2020. Tujuan sensus penduduk untuk mengetahui:

1. Mensosialisasikan kegiatan sensus penduduk 2020
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sensus penduduk 2020
3. Pencanaan SP2020 secara online
4. Pengisian Sensus Penduduk secara Online.

Acara ini diikuti oleh 211 peserta, dari BBTCLPP Yogyakarta dihadiri oleh Kasie Lingkungan Fisika dan Kimia (Tri Setyo Winaryanto, ST, M.Sc) dan Kasubbag Umum (Heni Amikawati, SKM).

Rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Daerah D.I.Yogyakarta (Bapak Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji) yang membacakan sambutan Gubernur D.I Yogyakarta menyampaikan bahwa mengapresiasi sensus Penduduk 2020 karena berbeda dari yang sebelumnya. Sensus Penduduk yang ke 7 ini dapat dilaksanakan mandiri secara on line mulai tanggal 15 Februari s.d 31 Maret 2020 dan yang belum registrasi secara on line akan didatangi oleh petugas untuk wawancara pada tanggal 1 s.d 31 Juli 2020. Tujuan sensus penduduk untuk mengetahui:

1. Perkembangan penduduk
2. Penyebaran dan kepadatan penduduk
3. Atribut sosial penduduk.

Oleh karena itu gubernur mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mensukseskan SP 2020.

Materi yang disampaikan dalam rapat koordinasi antara lain:

1. Dukungan Polda DIY pada SP 2020 disampaikan oleh Anggara Nasution SH, SIK, MM (bagian binkar biro SDM Polda DIY)
Dukungan Polda DIY untuk mensukseskan SP 2020 secara intern adalah dengan melakukan sosialisasi pada seluruh anggota kepolisian di wilayah Polda DIY. Dukungan secara eksternal: 1) membekali anggota babinkamtibmas tentang pengetahuan seputar SP 2020 untuk melakukan sosialisasi SP 2020 kepada masyarakat di wilayah binaannya agar melakukan SPO 15 Februari s.d 31 Maret 2020. 2) menugaskan babinkamtibmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan ada petugas sensus untuk melakukan wawancara pada penduduk 1 s.d 31 Juli 2020. 3) memberi dukungan untuk pengamanan secara terbuka dan tertutup terhadap petugas pengumpul data.
2. SP 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia oleh Dr. Heru Margono, M.Sc (kepala BPS DIY)
Sensus Penduduk adalah pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS secara menyeluruh setiap 10 tahun, berguna untuk 1) menyediakan data penduduk secara de facto dan de jure. 2) menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk ke depan. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan infra struktur di masing-masing wilayah. SP 2020 ini mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yaitu untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan.



Pelaksanaan Sp 2020

- Sensus Penduduk On line (SPO) 15 Februari s.d 31 Maret 2020 dengan membuka laman sensus.bps.go.id
- Sensus Penduduk wawancara untuk penduduk yang belum melakukan SPO akan dilaksanakan 1 s.d 31 Juli 2020
- Tahun 2021 akan dilakukan survey secara acak untuk melihat karakteristik penduduk.

Data yang sudah diperoleh bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan. Pada akhir sesi dilakukan pengisian sensus penduduk online 2020 oleh peserta pertemuan.

Sosialisasi Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan



Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, pada tanggal 3 Maret 2020 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melaksanakan sosialisasi peraturan tersebut. BBTCLPP Yogyakarta merupakan salah satu dari 108 instansi yang diundang. Pada kesempatan kali ini BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Sri Ningsih, S ST., M.T. Pertemuan dilaksanakan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta, Jl. Tentara Pelajar No. 13 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.

Pada pertemuan ini disampaikan materi tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berisi dasar hukum, jenis fasilitas fiskal, cakupan fasilitas, subyek fasilitas, obyek fasilitas, persyaratan dokumen, lampiran permohonan, pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk, proses permohonan, ketentuan perubahan keputusan pembebasan, proses penyelesaian barang eks fasilitas, timeline, ketentuan pemindahtanganan, ekspor kembali dan pemusnahan, permasalahan yang sering terjadi dan pelayanan permohonan.

Dijelaskan dalam paparan bahwa barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengerahuan adalah barang dan/atau peralatan yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas yang diberikan adalah bea masuk dan cukai dibebaskan, tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM dikecualikan PPh pasal 22 Impor. Subyek fasilitas adalah PTN/PTS, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha (BU). Janji layanan : secara manual tiga hari kerja, secara otomasi lima jam kerja.

Jika menghendaki informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan informasi :

- Telephon : 0274-489405 ext 111
- Facebook : Bea Cukai Jogja
- Email : penyuluhan.bcjogja@gmail.com
- Website : <http://bcyogyakarta.beacukai.go.id>
- Instagram : @beacukaiyogyakarta

Pertemuan Penilaian Mandiri Penatalaksanaan Kantor Berhias, Koordinasi Belanja Pegawai dan Operasional Direktorat Jenderal P2P



Pada tanggal 3 s.d 6 Maret 2020 bertempat di Eastparc Hotel Yogyakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menyelenggarakan Pertemuan Penilaian Mandiri Penatalaksanaan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau dan Sehat (BERHIAS), Koordinasi Belanja Pegawai dan Operasional Ditjen P2P yang dihadiri oleh 63 Satker Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal P2P, dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang. BBTCLPP Yogyakarta dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Dian Trikoriati, S.T, SKM, MPH), Kasubbag Umum (Heni Amikawati, SKM) dan Pengelola Kantor Berhias (Restu Wiratni, A.Md).

Sambutan sekaligus pembukaan acara disampaikan oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM, mewakili Sekretaris Ditjen P2P (dr. Achmad Yuriyanto). Dalam sambutannya disampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan yaitu agar terjadi kesepakatan, keseragaman, dan menggali kendala/permasalahan pada Satker Pusat dan UPT terkait penyelenggaraan serta pengisian sistem pelaporan online Gerakan Kantor Berhias, sedangkan untuk Belanja Mengikat khususnya Gaji dan Tunjangan Kinerja agar disesuaikan dengan jumlah pegawai dan diperhitungkan sepresisi mungkin agar tidak ada lagi satker UPT yang kekurangan atau kelebihan terlalu besar sehingga penyerapan anggaran dapat optimal.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Biro Umum Setjen yang disampaikan oleh M. Edwin Arafat, S.Kom dan tim tentang Hasil dan Tindak Lanjut Penilaian Gerakan Kantor Berhias serta Tutorial Pengisian Aplikasi yang dapat diakses dengan URL berhias.kemkes.go.id. Hasil dari penyelenggaraan Gerakan Kantor BERHIAS yang telah dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Daerah/UPT berkontribusi terhadap prestasi yang telah diraih Kementerian Kesehatan sebagai Juara I Penghargaan Efisiensi Energi Nasional pada Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM.

Selanjutnya diharapkan dapat terwujudnya perubahan perilaku pegawai seiring dengan pengaplikasian 5 aspek yaitu Efisiensi Energi dan Air, Kantor Ramah Lingkungan, Pengelolaan Kearsipan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dalam rangka mewujudkan kantor yang aman, nyaman, dan sehat sehingga produktifitas ASN dapat meningkat dan sesuai serta terciptanya SDM Unggul Indonesia Maju di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Setelah arahan dan pemaparan materi oleh narasumber, acara dilanjutkan desk dengan Unit Utama yang terdiri dari desk pengelolaan kearsipan, belanja mengikat (gaji dan tunjangan kinerja), belanja operasional perkantoran dan penatalaksanaan gerakan kantor berhias sesuai petunjuk perencanaan TA2020.

Peningkatan Kapasitas SDM Teknis Sanitarian BBTKLPP Yogyakarta Tahun 2020

Guna meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan sampah bagi fungsional sanitarian di bidang ADKL BBTCLPP Yogyakarta mengadakan pelatihan. Kegiatan dilaksanakan 03-04 Maret 2020, narasumber dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jumlah peserta 12 orang terdiri pejabat struktural dan fungsional sanitarian di Bidang ADKL.

Hari pertama dimulai pembukaan dan pemaparan materi yaitu Pengelolaan Sampah Terpadu oleh Dr. Bambang Suwerda, S.ST., M.Si, materi Stop Nyampah oleh Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes. Pada pembukaan ibu Feri Astuti, S.T., M.P.H menyampaikan agar peserta mengikuti pelatihan dengan serius. Materi pelatihan dapat disampaikan pada saat sosialisasi hasil kegiatan surveilans faktor risiko penyakit potensial KLB/wabah pada arus mudik lebaran, lingkungan sekolah dan event khusus.



Dr. Bambang Suwerda, S.ST., M.Si menyampaikan pengelolaan sampah yang baik dilakukan secara berkesinambungan dengan memberdayakan masyarakat. Salah satu langkah yang efektif adalah dengan mengedukasi anak sedini mungkin tentang pengelolaan sampah, bila anak-anak sadar sampah mereka yang akan selalu mengingatkan orang tuanya. Konsep pengelolaan sampah adalah mengurangi sampah dari bak sampah untuk menjadikan bentuk lain, serta mengurangi perilaku masyarakat membakar sampah. Dalam pembentukan bank sampah lebih banyak melibatkan masyarakat dan memilih salah satu menjadi agen of change. Prinsipnya sampah alam dikembalikan ke alam, sampah pabrik kembali ke pabrik.

Dr. Iswanto, S.Pd., M.Kes.menyampaikan sebelum membeli sesuatu harus gemi, nastiti dan ngati-ati. Gemi artinya hemat, nastiti: teliti, memilih barang yang bisa awet dan ngati-ati: memelihara agar tetap awet. Gaya hidup meminimalis sampah sangat penting. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat akan lebih maksimal bila disupport oleh pemerintah. Seperti di Sleman kompos yang dihasilkan dibeli oleh pemerintah. Kabupaten Bantul digalakkan ASN untuk menabung sampah. Mengelola sampah dengan 3-Kid (mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang).

Kunjungan dan praktek pembuatan kompos dilakukan di Desa Wisata Sukunan. Di sini terdapat bank sampah yang dikelola masyarakat, seminggu sekali melayani tabungan sampah dan sedekah sampah. Pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga sebelum ditabungke bank sampah. Sebagian sampah plastik dijadikan kerajinan tangan untk dijual. Sampah organik dan sampah kebun dibuat kompos. Masyarakat dibiasakan mengelola sampah dalam biopot di rumah masing-masing.

Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacangan

Filariasis yang sering disebut penyakit kaki gajah adalah penyakit zoonosis menular dan menahun yang disebabkan oleh cacing filaria. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening dan menyebabkan infeksi yang berakibat terjadinya elefantiasis berupa pembesaran tungkai bawah (Khaki), sehingga secara umum dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Indonesia termasuk Negara endemis Filariasis, terdapat 239 dari 511 kabupaten/kota di Indonesia yang endemis filariasis (Kemenkes, 2015). Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 118 kabupaten/kota telah dinyatakan eliminasi filariasis. Di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah kerja Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta terdapat 9 kabupaten/kota yang endemis filariasis dan sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada yang eliminasi. Untuk meningkatkan kualitas evaluasi Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacangan dibutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak terkait baik dalam dukungan teknis maupun pendanaan.

Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) melalui Subdit Filariasis dan Kecacangan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ) menyelenggarakan “Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Filariasis Dan Kecacangan” di Hotel Aloft Jakarta tanggal 11-14 Februari 2020.

Pertemuan dihadiri perwakilan dari 10 B/BBTKLPP se Indonesia dan 9 Badan/Balai Besar/Balai/Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dari seluruh Indonesia.



Dari BBTKLPP Yogyakarta hadir Kasie Advokasi dan KLB, Dien Arsanti, SKM., M.Env, Supervisor kegiatan Filariasis dan kecacangan, Heldhy B Kristiyawan, SKM., M.Eng dan Perencana, Mardiansyah, S.Kom., M.P.H. Acara dibuka oleh Kasubdit Filariasis dan Kecacangan, Lita Renata Sianipar, SKM., M.Epid. Disampaikan bahwa proses evaluasi POPM butuh keterlibatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), tidak hanya UPT Ditjen P2P tetapi juga UPT Puslitbangkes. Untuk itu diselenggarakanlah pertemuan ini agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas kegiatan evaluasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacangan.

Pertemuan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibagi dalam tiga sesi, yaitu sesi satu adalah materi mengenai program yang disampaikan oleh narsum dari pusat dengan judul materi yaitu Strategi Percepatan Penanggulangan Filariasis dan Kecacangan di Indonesia disampaikan Kasubdit Filariasis dan Kecacangan, judul materi Tahapan Monitoring dan Evaluasi Filca dan Dukungan B/BBTKLPP dan Balai Litbang yang disampaikan oleh Kasie Filariasis dan kasie Kecacangan serta materi dukungan anggaran dalam program penanggulangan Filariasis yang disampaikan Kabag PI. Sesi dua mengenai Dukungan B/BBTKLPP terhadap Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacangan Tahun 2019-2020 yang disampaikan oleh perwakilan dari 10 B/BBTKLPP Se-Indonesia. Sesi 3 yaitu Dukungan Badan/Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes dari seluruh Indonesia terhadap Program Penanggulangan Filariasis dan Kecacangan Tahun 2019-2020 yang disampaikan oleh perwakilan dari 9 Badan/Balai Besar/Balai/Loka Litbangkes dari seluruh Indonesia. Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan Desk kegiatan dan anggaran oleh Subdit Filariasis dan Kecacangan terhadap B/BTKLPP untuk memastikan kegiatan wajib dalam rangka evaluasi POPM sudah dianggarkan/diusulkan. Hasil Desk BBTKLPP Yogyakarta merekomendasikan bahwa kegiatan Pre-TAS di 3 kabupaten (Blora, Pati dan Pekalongan) tahun 2020 agar diselenggarakan sesegera mungkin (Juni-Juli) sehingga hasilnya segera diketahui dan jika kegiatan Pre-TAS berhasil dapat diusulkan kegiatan lanjutan berupa TAS-1 di tahun anggaran 2021.



Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi SAKIP Satker Pusat dan Daerah. Pertemuan diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada tanggal 10 – 13 Maret 2020, dengan peserta seluruh satker pusat dan daerah. Sebagai salah satu satker daerah, BBTCLPP Yogyakarta menghadiri pertemuan ini.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal P2P, dr. Achmad Yurianto, yang sekaligus menyampaikan arahan kepada peserta. Dalam arahnya, Dirjen P2P menyampaikan beberapa poin penting terkait pentingnya penyelenggaraan SAKIP sebagai sebuah kewajiban instansi pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dirjen menekankan agar menjadikan SAKIP sebagai kultur kerja, bukan sebagai suatu rutinitas. Sebagai sebuah sistem, SAKIP dapat menggambarkan bagaimana permasalahan dan tindak lanjutnya. Berbicara tentang SAKIP bukan tentang nilai semata, tapi masalah moral. Mekanisme desk diharapkan dapat menggali permasalahan SAKIP sebagai bahan persiapan reviu dengan Itjen. Pada kesempatan ini, Dirjen sangat berharap Kepala Satker terlibat langsung saat reviu dengan Itjen yang direncanakan mulai pada akhir Maret 2020.

Pada kesempatan ini, ada pula paparan oleh beberapa narasumber. Kabag PI memaparkan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 di lingkungan Ditjen P2P, baik satker pusat maupun daerah. Inspektur III Itjen Kemenkes memaparkan tentang evaluasi SAKIP tahun 2018 dan persiapan evaluasi tahun 2019. Salah satu poin penting yang disampaikan bahwa nilai SAKIP sebagai target indikator kinerja Itjen adalah “BB”, sehingga tidak perlu mengejar nilai, namun yang terpenting adalah menyelenggarakan SAKIP benar-benar sesuai dengan ketentuan. Secara panel, Kabag Kepegawaian dan Umum, Kabag Keuangan, serta Kabag Biro Hukum dan Organisasi memaparkan tentang indikator kinerja tahun 2020. Pemaparan ditutup dengan penyajian materi oleh narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi Kemnkes dengan topik Peran SAKIP dalam implementasi RB di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Setelah seluruh pemaparan selesai, BBTCLPP Yogyakarta mengikuti proses desk dengan Unit Utama melalui verifikasi.

terhadap kelengkapan dan pemenuhan kriteria dokumen-dokumen sebagai bukti penyelenggaraan SAKIP tahun 2019 di BBTCLPP Yogyakarta. Proses desk berjalan lancar dengan diterbitkannya Catatan Hasil Reviu (CHR) LAKIP dan Catatan Hasil Desk (CHD) SAKIP.

Dengan berakhirnya proses desk ini, diharapkan BBTCLPP Yogyakarta akan lebih siap mengikuti proses reviu SAKIP yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan.

Sosialisasi E-Office Kementerian Kesehatan Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2020

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 12 s.d 14 Maret 2020 menyelenggarakan Sosialisasi e-Office Kementerian Kesehatan Terintegrasi bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara, Lorong Perjuangan, Kebun Bunga, kecamatan Sukarami, kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Sosialisasi ini mengundang 103 satuan kerja. Dari BBTKLPP Yogyakarta dihadiri oleh kasubbag Umum (Heni Amikawati)

Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 12 s.d 14 Maret 2020 menyelenggarakan Sosialisasi e-Office

Kementerian Kesehatan Terintegrasi bertempat di Hotel Santika Premiere Bandara, Lorong Perjuangan, Kebun Bunga, kecamatan Sukarami, kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Sosialisasi ini mengundang 103 satuan kerja. Dari BBTKLPP Yogyakarta dihadiri oleh kasubbag Umum (Heni Amikawati)

Dalam sambutan selamat datang, kepala dinas kesehatan provinsi Sumatera Selatan (ibu Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes) menyampaikan ucapan terimakasih karena Palembang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan acara. Semoga acara berjalan lancar dan menyenangkan. UPT kemenkes yang berkedudukan di Sumatera Selatan yang pada saat ini menghadiri pertemuan agar dapat "getok tular" materi yang disampaikan untuk kemajuan Sumatera Selatan.

Acara sosialisasi dibuka oleh kepala Pusat Data dan Informasi (Dr.drh.Didik Budijanto, M.Kes.) yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkes (drg. Oscar Primadi, MPH). Dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas terselenggaranya acara Sosialisasi e-Office Kementerian Kesehatan Terintegrasi, semoga materi sosialisasi yang disampaikan dapat diserap dan diimplementasikan di UPT kemenkes. Semua UPT untuk mendukung penggunaan e-office untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien.

Materi yang disampaikan antara lain:

1. Keamanan Informasi dan Sertifikat Elektronik pada e Office Kemenkes disampaikan oleh Direktur Proteksi Pemerintah, BSSN (Dwi Kardono, S.Sos, MA)
2. Kebijakan Tata Kelola TIK Kementerian Kesehatan disampaikan oleh kepala Pusat Data dan Informasi (Dr.drh.Didik Budijanto, M.Kes.)
3. Kebijakan Perjadin ASN disampaikan oleh kapid Pengelolaan Data dan Informasi DJPB Sumatera Selatan (Ahmad Sobari)
4. Kebijakan dan Penggunaan Sistem Kehadiran dan Perjadin Dinas Dalam Negeri bagi PNS disampaikan oleh Kapid Pengelolaan Teknologi Informasi (Yudianto, SKM, M.Si)
5. Kebijakan dan Penggunaan Layanan Monitoring dan Evaluasi (e-monev) Belanja Pegawai disampaikan oleh kasubbag verifikasi gaji Biro Umum kemenkes (Mashuri)
6. Kebijakan dan Penggunaan Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik dan Perjalanan Dinas Luar Negeri disampaikan oleh kabag kearsipan dan administrasi Biro Umum Kemenkes (Lilis Setyowati, SE)
7. Kebijakan dan Penggunaan Sistem Pengelolaan BMN secara elektronik (e-BMN) disampaikan oleh kasubbag Penghapusan BMN Biro Keuangan Kemenkes (Harisya)
8. Kebijakan dan Penggunaan Sistem Cuti Luar Negeri bagi PNS disampaikan oleh analis kepegawaian ahli Biro Kepegawaian Kemenkes (Wahyu Hanggoro S, SH)
9. Simulasi e Office
10. Selayang Pandang Layanan Pusdatin



Acara ditutup oleh kepala Pusat Data dan Informasi (Dr.drh.Didik Budijanto, M.Kes.) dengan arahan sesuai permenkes RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan E-Office Di Lingkungan Kementerian Kesehatan agar secara bertahap UPT menggunakan e-office. UPT agar menyampaikan masukan masukan yang berguna untuk penyempurnaan e-office.

Pemeriksaan Covid-19 dengan rapid test untuk petugas pelayanan Covid-19 BBTKLPP



Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020, BBTKLPP Yogyakarta merupakan salah satu dari 12 jejaring laboratorium pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang memiliki wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satu tugasnya yaitu sebagai laboratorium pemeriksaan Covid-19.

Sehubungan dengan itu, pada Hari Senin tanggal 6 April 2020, bertempat di Ruang Aula Barat lantai 3, BBTKLPP Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Covid-19 dengan rapid test untuk petugas pelayanan Covid-19 di lingkungan BBTKLPP Yogyakarta baik untuk petugas pengambil sampel, petugas registrasi sampel, petugas pengujian sampel dan petugas pendukung lainnya. Rapid Test ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini terjadinya kasus Covid-19 bagi pegawai BBTKLPP Yogyakarta sehingga dapat dilakukan tindakan tepat untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dari rapid test Covid-19 yang dilakukan, semua hasil dinyatakan negatif.

Untuk diketahui, dilansir dari website covid19.go.id, rapid test dilakukan secara terbatas hanya untuk orang-orang yang beresiko dengan kategori sebagai berikut:

1. Orang Tanpa Gejala (OTG), yaitu seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP), yaitu seseorang yang memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi local atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19 dengan gejala demam (? 38 derajat celcius) atau pilek/sakit tenggorokan/batuk
3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP), yaitu seseorang yang memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi local atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19 dengan gejala demam (?38 derajat celcius) atau pilek/sakit tenggorokan/batuk/pneumonia ringan hingga berat dan orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit

Kunjungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X di BBTCLPP Yogyakarta Dalam Rangka Koordinasi dan Tinjauan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta. Kedatangan beliau didampingi Kepala Dinas DIY beserta rombongan disambut oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM beserta pejabat struktural dan staf teknis lainnya.

Kunjungan Sri Sultan Hamengku Buwono X ini bertujuan untuk koordinasi dan tinjauan kesiapan BBTCLPP Yogyakarta yang telah ditunjuk sebagai laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/182/2020 tanggal 16 Maret 2020, BBTCLPP Yogyakarta merupakan salah satu dari 12 jejaring laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang memiliki wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).



Pada kesempatan ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau langsung laboratorium virologi BBTCLPP Yogyakarta yang sudah sesuai standar Biosafety Level 2 (BSL-2), baik dari kesiapan peralatan pendukung pemeriksaan sampel, standar operasional prosedur mulai dari penerimaan sampel, pemeriksaan sampel hingga penerbitan hasil pemeriksaan sampel.

Acara dilanjutkan Konferensi pers kepada media. Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap dengan adanya BBTCLPP Yogyakarta dapat memudahkan akses pemeriksaan sampel Covid-19 yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sehingga hasil pemeriksaan dapat diketahui lebih cepat serta penanganannya juga lebih cepat. Kemudian, Sri Sultan berharap agar masyarakat selalu meningkatkan upaya pencegahan dan penularan virus corona.

Pada kesempatan itu juga, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, BBTCLPP Yogyakarta diberi wewenang untuk pemeriksaan Covid-19 yang berasal dari Rumah Sakit/Dinas Kesehatan dan atau laboratorium kesehatan lainnya, khusus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 dan kontak tracing jika ada yang positif atau orang dalam pengawasan (ODP). Kemudian, beliau juga berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan pusat untuk optimalisasi proses pemeriksaan sampel serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bersama wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pertemuan Jejaring Laboratorium Rujukan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY



Pada Hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan pertemuan jejaring laboratorium rujukan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Bertempat di Gedung utama BBTCLPP Yogyakarta, Jl. Imogiri Timur Km.7 Bantul, pertemuan diselenggarakan dengan metode tatap muka dan teleconference. Hadir dalam pertemuan secara tatap muka terdiri dari Kepala dan Pejabat Struktural BBTCLPP Yogyakarta, Plh Direktur RSUP Dr. Sardjito, Kepala Dinkes D.I. Yogyakarta, Kepala Balai Laboratorium Kesehatan DIY, Kepala Seksi Yankes Rujukan Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan Lab Mikrobiologi RSUP dr. Sardjito, Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit Akademik UNS, BBPPVRP Salatiga, Badan Intelejen Nasional, Kantor Staf Presiden RI. Selain itu hadir juga peserta yang mengikuti secara teleconference dari RS Universitas Diponegoro.

Latar belakang diselenggarakannya pertemuan adalah ditunjuknya 7 (tujuh) laboratorium di DIY dan Provinsi Jateng sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19 berdasarkan KMK 182 tahun 2020, KMK 214 Tahun 2020 dan KMK 216 Tahun 2020, dimana disebutkan bahwa laboratorium rujukan yang tidak mempunyai fungsi surveilans harus berkoordinasi dengan laboratorium yang mempunyai fungsi surveilans. BBTCLPP Yogyakarta selaku laboratorium yang mempunyai fungsi surveilans menyelenggarakan pertemuan ini dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sampel COVID-19.

Pertemuan dipimpin oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene MKM. Dalam sambutannya beliau menyampaikan beberapa hal terkait fungsi surveilans yang harus dijalankan oleh BBTCLPP Yogyakarta terkait pemeriksaan dan pelaporan sampel COVID-19 serta beberapa kendala dalam pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel. Acara dilanjutkan dengan penyampaian kesiapan dan kendala masing-masing laboratorium untuk melakukan pemeriksaan sampel COVID-19 dan arahan dari narasumber terkait kendala yang disampaikan oleh peserta yang hadir. Acara dilanjutkan dengan materi oleh narasumber lainnya yang disampaikan melalui teleconference yaitu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dan Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbang Kemenkes RI.

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa Sampai saat ini baru dua laboratorium yang siap memeriksa sampel Covid-19 untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY yaitu BBTCLPP Yogyakarta dan BBP2PRV Salatiga, sedangkan laboratorium lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat melakukan pemeriksaan sampel Covid-19.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Klinik Pratama Di DIY



Pada tanggal 7 dan 8 April 2020, Dinas Kesehatan D.I.Yogyakarta menyelenggarakan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan klinik pratama di DIY. Tujuan diselenggarakannya pertemuan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait pencegahan, pengendalian, kesiapsiagaan dan penanganan infeksi Novel Coronavirus (COVID-19). Bertempat di Aula C Dinas Kesehatan DIY, pertemuan diselenggarakan melalui Webinar. Peserta pertemuan hari pertama adalah Puskesmas di D.I.Y., sedangkan peserta hari kedua adalah klinik pratama di D.I.Y.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Seksi Kesehatan dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus Bidang Pelayanan Kesehatan, dr Fitri Indah Setiyawati, M.Sc., dilanjutkan dengan materi, yang pertama mengenai manajemen klinis infeksi Novel Coronavirus (COVID-19) yang disampaikan oleh ketua Tim Viral Airborne RSUP dr. Sardjito, materi kedua mengenai kewaspadaan pencegahan dan pengendalian infeksi Novel Coronavirus (COVID-19) yang disampaikan oleh ketua Tim PPI RS. dr. Sardjito, sedangkan materi ketiga mengenai surveilans, pengambilan dan pengelolaan specimen infeksi Novel Coronavirus (COVID-19) disampaikan oleh tim dari BBTCLPP Yogyakarta yaitu Kasie Advokasi dan KLB yang menyampaikan mengenai Surveilans COVID-19

dan dari laboratorium BBTCLPP Yogyakarta menyampaikan mengenai pengambilan, pengepakan dan pengiriman sampel COVID-19.

Disampaikan bahwa BBTCLPP Yogyakarta adalah salah satu laboratorium pemeriksa COVID-19 di DIY berdasarkan KMK No. KMK 182 tahun 2020, KMK 214 Tahun 2020 dan KMK 216 Tahun 2020. Selain itu BBTCLPP Yogyakarta juga mempunyai fungsi surveilans sesuai PMK nomor 2349 tahun 2011. Oleh karena itu terkait respon COVID-19 BBTCLPP Yogyakarta melakukan fasilitasi tidak hanya pemeriksaan sampel COVID-19 tetapi juga, membantu fasyankes dalam pengambilan sampel PDP sekaligus OJT kepada fasyankes yang bersangkutan, melakukan fasilitasi pemantauan OTG dan ODP, memberi bantuan bahan untuk pengambilan sampel usap nasopharing dan Orofaring, serta memberikan notifikasi Penyelidikan Epidemiologi kasus confirm kepada dinas kesehatan terkait dengan tujuan agar segera dilakukan Pelacakan kontak erat sehingga dapat dilakukan upaya pemutusan penularan secara cepat.

On The Job Training Pengambilan Sampel Usap Dan Manajemen Sampel Covid-19

Pada tanggal 23 April 2020, telah dilaksanakan On the Job Training (OJT) pengambilan sampel usap dan manajemen sampel COVID-19 di RS Lapangan Khusus COVID-19 (RSLKC) Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Kegiatan ini diikuti oleh 11 orang peserta yang terdiri dari tenaga medis dan paramedis dari RSLKC Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan RS Elizabeth Bantul.

Acara dimulai dengan penjelasan dari Kepala RSLKC Bantul dr. T Glory mengenai RSLKC Bantul yang saat ini merupakan satu-satunya RS khusus COVID-19 di DIY. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala BBTKLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM. Disampaikan apresiasi mengenai adanya RS khusus COVID-19 tersebut dan dukungan BBTKLPP Yogyakarta terhadap penanganan kasus COVID-19 di RSLKC Bantul tersebut.

Acara berikutnya adalah paparan mengenai Teknik pengambilan sampel usap COVID-19 serta pengepakan dan pengiriman sampel. Materi disampaikan Yulianta, S. ST. setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan simulasi pengambilan sampel di kelas oleh sesama peserta dengan dibimbing narasumber dan dilanjutkan dengan pengambilan sampel pada kasus COVID-19 yang dirawat di RSLKC Bantul.



Pertemuan Sosialisasi End User Training Aplikasi E-SPM



Pada Hari Kamis, tanggal 23 April 2020, BBTKLPP Yogyakarta memenuhi undangan Pelaksanaan Video Conference. Bertempat di Gedung Lama Ruang Rapat Ka. BBTKLPP Yogyakarta Lantai II, Jl. Wiyoro Lor No.21 Baturetno, Banguntapan-Bantul, pertemuan dilaksanakan dengan Video Conference Sesi I pkl.08.00 s/d 10.00 wib. Hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes dan Operator SAS/SAKTI Dani Martanto, SE.

Latar belakang dilaksanakannya Kegiatan Video Conference perihal Sosialisasi End User Training Aplikasi E-SPM adalah sebagai Impelementasi Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI dalam memberikan Inovasi Pelayanan kepada User/Stakeholder yang diterapkan melalui UPT di Lingkup Ditjen Perbendaharaan.

BBTKLPP Yogyakarta sebagai salah satu Mitra Kerja KPPN Yogyakarta juga sudah diwajibkan menggunakan Layanan Aplikasi E-SPM sebagai pelaksanaan APBN yang transparansi dan Akuntabel.

Video Conference telah dibuka oleh Kepala KPPN Yogyakarta Istu Wahudi. Dalam pembukaannya beliau menyampaikan beberapa hal terkait Rencana dan Strategi Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI salah satunya adalah Implementasi Aplikasi E-SPM sehingga pengajuan dan pencairan APBN tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka dalam rangka meminimalisir resiko adanya tindak Korupsi dan sebagainya yang menyebabkan kerugian negara. Secara teknis Implementasi E-SPM tetap mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya yaitu adanya pembatasan jumlah tagihan untuk pembayaran belanja negara, serta waktu yang telah ditentukan untuk melakukan Upload data tagihan melalui E-SPM.

Dari hasil diskusi melalui Video Conference dapat disimpulkan bahwa dimulai pada tanggal 27 April 2020 KPPN Yogyakarta sudah menerapkan sistem E-SPM bagi seluruh Mitra Kerjanya di Wilayah Kerjanya meliputi Kota Yogyakarta, Kab.Sleman dan Bantul serta tetap memberikan Pelayanan Pengaduan/Konsultasi apabila masih ditemukan adanya permasalahan teknis yang mungkin timbul di tingkat Satuan Kerja

Teleconference Koordinasi Unit Utama (DITJEN P2P) Dan Satkernya Terkait Rencana Refocusing Anggaran Untuk Penanganan COVID-19



Kamis 14 Mei 2020, Ditjen P2P dalam hal ini Bagian Program dan Informasi menggelar Teleconference terkait Rencana refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

BBTKLPP Yogyakarta sebagai salah satu peserta refocusing diikuti oleh Ibu Dhelina Auza Utami (Kasubbag Program dan Laporan), Ibu Nila Cakarawati (Kasie Teknologi Laboratorium) dan Ibu Nadia Regina Martanti (Perencana) bersama dengan 6 satker pelaksana refocusing yang lain yaitu 1 satker Pusat (Direktorat Surkarkes) dan 5 Satker lainnya di bawah Dirjen P2P.

Dalam Teleconference disampaikan oleh Ibu Elvieda Sariwati (Kabag Program dan Informasi) dan Ibu Sherly Hinele (Kasubbag Anggaran) dari Dirjen P2P terkait kondisi kebijakan refocusing anggaran terkait penanganan Covid19 di P2P dan menyampaikan beberapa hal yang harus disiapkan oleh Satker serta waktu penyelesaian proses refocusing yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan cepat dan simultan, karena proses ini akan berlangsung seperti revisi pada umumnya yaitu melalui reviu berjenjang baik dari unit utama, Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes serta Tim APIP Kemenkes RI.

Setelah penjelasan selesai dibuka sesi tanya jawab yang berlangsung aktif terkait kendala-kendala dalam penyiapan revisi anggaran tersebut yang secara langsung dibahas dan disepakati solusinya.

Conference ditutup dengan harapan satker dapat segera melakukan langkah-langkah percepatan agar proses reviu berjalan lancar dan semua kebutuhan dokumen dukung dapat disiapkan dengan baik agar proses refocusing dapat diselesaikan dengan cepat dan anggaran yang dialokasikan segera dapat dimanfaatkan untuk dukungan penanganan Covid19.

Rapat Persiapan pelayanan COVID-19 selama libur hari raya Idul Fitri 1441 H



Cuti bersama Idul Fitri 1441 H yang semula ditetapkan 26-29 Mei 2020 diundur ke tanggal 28-31 Desember 2020, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 391/2020, Nomor 02/2020 dan Nomor 02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB Nomor 728/2019, Nomor 213/2019, dan Nomor 01/2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Walaupun demikian di akhir Bulan Mei ini libur hari besar agama tetap ada yaitu tanggal 21 Mei 2020 libur Kenaikan Isa Al Masih dan tanggal 24-25 Mei libur Hari Raya Idul Fitri.

Untuk memastikan bahwa pelayanan laboratorium COVID-19 tetap berjalan sebagaimana biasa, pada tanggal 18 Mei 2020, BBTCLPP Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Persiapan pelayanan COVID-19 selama libur hari raya Idul Fitri 1441 H. rapat diselenggarakan di Gedung BBTCLPP Yogyakarta Jl. Imogiri Timur Km.7. Rapat dihadiri oleh 20 orang yang terdiri dari struktural BBTCLPP Yogyakarta, personil instalasi yantek, tim laboratorium COVID-19, tim desinfeksi, petugas kebersihan dan satpam. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene MKM. Dalam arahannya disampaikan bahwa pelayanan COVID-19 harus tetap ada selama hari libur untuk itu harus dilakukan pengaturan jadwal dan petugas dengan baik agar pelayanan COVID-19 terlaksana. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai pengaturan petugas, penyiapan alat dan bahan pemeriksaan serta logistic untuk petugas yang bekerja, penetapan jadwal operasional pelayanan COVID-19 dan pencatatan dan pelaporan hasil laboratorium. Dari hasil diskusi disepakati mengenai operasional pelayanan COVID-19 selama libur hari besar agama di Bulan Mei 2020.

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan Tahun 2020



Pada hari rabu, tanggal 20 Mei 2020, bertempat di Auditorium Siwabessy Gedung Sujudi Kemenkes Jakarta, Direktur Jenderal P2P, dr. Achmad Yurianto melantik 28 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 103 Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes RI.

Sehubungan dengan masa status darurat bencana wabah penyakit virus corona 19, proses pelantikan bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilaksanakan secara virtual menggunakan media teleconference dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta dilaksanakan di Aula Lantai 3 Gedung BBTCLPP Yogyakarta disaksikan oleh seluruh pejabat struktural eselon 2, eselon 3 dan eselon 4. Adapun pejabat pengawas (Eselon 4) BBTCLPP Yogyakarta yang dilantik terdiri dari:

1. dr. Yohanna Gita Chandra, M.S sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Lingkungan Biologi, Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan dilantik menjabat Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi Informasi, Bidang Surveilans Epidemiologi
2. Dien Arsanti, SKM, M. Env, sebelumnya menjabat Kepala Seksi Advokasi dan Kejadian Luar Biasa, Bidang Surveilans Epidemiologi dilantik menjabat Kepala Seksi Lingkungan Biologi, Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
3. Heni Amikawati, SKM, sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha dilantik menjadi Kepala Seksi Advokasi dan Kejadian Luar Biasa, Bidang Surveilans Epidemiologi
4. Pama Rahmadewi, SKM, sebelumnya menjabat Fungsional Epidemiologi, Bidang Surveilans Epidemiologi dilantik menjabat Kepala Sub Bagian Umum, Bagian Tata Usaha

Dalam sambutannya, Dirjen P2P menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah dalam rangka pembenahan dan pematapan organisasi, serta penyesuaian dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian yang penting dalam sistem kerja organisasi.

Sistem kerja organisasi tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya SDM yang berkompeten di bidangnya. Kompetensi SDM dalam pemerintahan ke depan menjadi sebuah hal yang mutlak, karena pengembangan kompetensi ASN secara eksplisit dan jelas diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

Selanjutnya Dirjen P2P berpesan agar setelah pelantikan dan serah terima jabatan selesai, diwajibkan para pejabat yang telah dilantik dapat melaksanakan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai, sehingga dapat dievaluasi capaian kinerja para pejabat di lingkungan Ditjen P2P. Diakhir sambutannya Dirjen P2P menyampaikan beberapa harapan, antara lain Pertama, pejabat yang baru dilantik agar dapat melakukan inovasi-inovasi, kreatifitas dalam bekerja sehingga dapat merubah mindset “business as usual” hal ini untuk memperbaiki kinerja dan motivasi organisasi, namun tetap dalam koridor yang benar; Kedua, harus jujur dan terbuka, dan bersedia menerima kritik dan saran.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin



Pimpinan dan staf BBTCLPP Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Kita memanfaatkan teknologi saat ini untuk bertukar kabar dan menjaga silaturahmi ya, Tetap di #rumahsaja dan #jagajarak untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bersama kita #lawancovid19

Pertemuan Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBTCLPP Yogyakarta



Sejak Juli 2017, BBTCLPP Yogyakarta telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Dan pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/1/141/2017, BBTCLPP Yogyakarta ditunjuk sebagai Satker yang menerapkan Zona Integritas berdasarkan Keputusan dan pada Bulan November 2018 BBTCLPP Yogyakarta ditetapkan sebagai Satker yang sudah Menerapkan Zona Integritas oleh Menteri Kesehatan.

Sehubungan dengan itu, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di aula lantai 3 kantor BBTCLPP Yogyakarta diselenggarakan Pertemuan Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan agenda evaluasi pelaksanaan WBK/WBBM dan sosialisasi surat keputusan anggota tim pokja baru.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr.dr. Irene, M.K.M dan diikuti oleh semua tim kelompok kerja (pokja) pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBTCLPP Yogyakarta. Dalam sambutannya, Ibu Irene menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras dari seluruh tim pokja yang telah bahu membahu menyiapkan dokumen pendukung WBK/WBBM terutama telah menjadi agen of change dalam rangka implementasi ZI WBK/WBBM di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta. Sebagai evaluasi, pada tahun 2019 BBTCLPP Yogyakarta adalah salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti tahapan Desk Evaluasi WBK tingkat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Akan tetapi dari 2 indikator yang dinilai yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), hanya nilai indikator IPP (32) yang dapat dipenuhi oleh BBTCLPP Yogyakarta, sedangkan nilai indikator IPAK (36) belum dapat dipenuhi, hanya kurang 0,1 poin saja namun itu sangat menentukan. Oleh karena itu, Ibu Irene mengharapkan agar tim pokja dan seluruh pegawai tetap semangat dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BBTCLPP Yogyakarta agar dapat lulus WBK/WBBM pada tingkat nasional dan berhasil menjadi satker yang melayani masyarakat dengan pelayanan prima.

VIRTUAL MEETING PEMBAHASAN APLIKASI LOGISTIK COVID-19



Untuk mendukung pemeriksaan COVID-19 pada laboratorium – laboratorium di lapangan, sejak 19 April sd 30 April Balitbangkes membantu BPNB dalam mendistribusikan bahan – bahan untuk laboratorium pemeriksaan COVID-19. Untuk mendukung kegiatan tersebut Balitbangkes telah menggunakan sistem aplikasi logistik untuk mengontrol pengiriman dan penerimaan barang tersebut.

Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta mengikuti acara virtual meeting bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dan jajaran Fasilitas Kesehatan Kemenkes RI. Satker BBTKLPP Yogyakarta diikuti oleh Kepala Balai Ibu Dr. dr. Irene, MKM, Kabid PTL Ibu Indah NurHaeni, SSi, MSc dan Kabid SE Bapak Sayekti Udi Utama, SKM, Mkes.

Dalam acara virtual meeting disampaikan sosialisasi tata cara penggunaan aplikasi logistik tersebut oleh Ibu Melyana Lumbantoruan. Aplikasi dapat dibuka melalui blc-log.litbang.kemkes.go.id/cms/index.php/login. Dengan aplikasi logistik tersebut diharapkan dapat mempermudah akses pengiriman, penerimaan dan pengontrolan barang/logistic serta dalam pencatatannya.

Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun 2020 di BBTKLPP Yogyakarta



Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun 2020 di BBTKLPP Yogyakarta

Mari amalkan Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong untuk menuju Indonesia maju. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa.

#Harilahirpancasila2020



Selamat Hari Lahirnya Pancasila tahun 2020.

Mari amalkan Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong untuk menuju Indonesia maju. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa.

#Harilahirpancasila2020

Penilaian Internal Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) BBTKLPP Yogyakarta



Pada tanggal 2 dan 3 Juni 2020 dilaksanakan penilaian internal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBTKLPP Yogyakarta oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan dibuka pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Tim WBK BBTKLPP Yogyakarta berkumpul di Aula lantai 3 BBTKLPP Yogyakarta, sedangkan Tim Penilai Internal Kemenkes (Bapak Wahono, S.T., M.M., Bapak Warseno, S.Kom., M.M., Bapak Endang Suryadi, S.K.M., M.M., Bapak Deny Yudhistira, S.K.M., dan Ibu Lady Farah Fatmawati, S.K.M.) hadir secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Susunan acara terdiri dari pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, Yel yel WBK oleh Tim WBK BBTCLPP Yogyakarta, sambutan Kepala BBTCLPP Yogyakarta, sambutan perwakilan Tim Penilai Internal, paparan oleh Kepala BBTCLPP Yogyakarta, tanya jawab/tanggapan dan penyampaian teknis penilaian oleh Tim Penilai Internal, dilanjutkan dengan penilaian masing-masing kelompok kerja (Pokja) Tim WBK.

Dalam sambutan Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, M.K.M. menyampaikan bahwa saat pandemi COVID-19 ini asesmen dilaksanakan dengan teleconference yang tentunya berbeda dengan asesmen pada biasanya. Seluruh proses pelaksanaan WBK di BBTCLPP Yogyakarta sudah diupload dalam aplikasi SIPINAL dan didokumentasikan dalam bentuk flipbook. Pada tahun ini ada pergantian personil Pokja karena ada mutasi internal pejabat struktural eselon IV BBTCLPP Yogyakarta selaku ketua pokja, namun dalam pemaparan ini masih akan disampaikan oleh Tim Pokja sebelumnya.

Sambutan perwakilan Tim Penilai Internal disampaikan oleh Bapak Warseno, S.Kom., M.M. Beliau menyampaikan bahwa penilaian ini dilakukan sangat berbeda karena dilaksanakan secara virtual. Tim penilai menyampaikan adanya perubahan pada penilaian dibuat lebih rinci dan terkait dengan survei pelanggan akan dilaksanakan secara online serta akan dicari sasaran yang akan dijadikan survei.

Paparan Kepala BBTCLPP Yogyakarta diisi dengan pemaparan tentang profil BBTCLPP Yogyakarta, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/Bagian, pemaparan tentang tugas yang dilaksanakan masing-masing Pokja WBK di BBTCLPP Yogyakarta, serta kendala-kendala dalam pelaksanaan SMS blast. Tim TPI Bapak Wahono, S. T., M.M. memberikan tanggapan bahwa pemaparan sudah cukup bagus, semoga yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan dokumen WBK namun memang diaplikasikan sehari-hari. Tim TPI juga memberikan beberapa pertanyaan terkait tampilan website dan pelayanan publik. Acara dilanjutkan dengan penilaian masing-masing Pokja WBK dari Pokja 1 hingga Pokja 6. Penilaian yang belum selesai dilanjutkan pada hari berikutnya. Pemenuhan kelengkapan dokumen dapat diselesaikan sesuai hasil diskusi dan saran-saran dari TPI tanggal 3 Juni 2020.

Virtual Meeting Dinas Kesehatan DIY Menghadapi Masa New Normal DIY



Untuk menghadapi telah berakhirnya masa tanggap darurat tahap I ke masa tanggap darurat ke II adalah menyiapkan DIY dalam memasuki masa new normal.

Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 Dinas Kesehatan DIY menyelenggarakan virtual meeting yang diikuti oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, gugus tugas Covid DIY, beberapa rumah sakit serta jejaring laboratorium Pemeriksa Covid-19. Dalam acara tersebut BBTCLPP Yogyakarta diikuti oleh Kepala Balai Ibu Dr. dr. Irene, MKM, Kabid PTL Ibu Indah Nur Haeni, SSi, MSc dan Kabid SE Bapak Sayekti Udi Utama, SKM, Mkes.

Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY, Ibu drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. Dalam pembukaan Beliau menyampaikan beberapa arahan dari Gubernur DIY bahwa :

1. Protokol kesehatan bisa dipastikan dapat dilaksanakan sampai basis wilayah terkecil yaitu RT.
2. Deteksi dini / screening untuk kasus baru harus lebih banyak dilakukan. Arahan dari WHO, pemeriksaan tidak hanya RDT saja tetapi juga pemeriksaan swab.

Ibu Pembayun menyampaikan bahwa di beberapa wilayah kabupaten DIY sudah dilakukan screening dan masih membutuhkan banyak bantuan baik secara SDM maupun kelengkapannya. Harapannya jika screening sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan sarana pelayanan kesehatan untuk menindaklanjuti hasil dari screening itu sendiri. Berharap ini semua dapat menjadi PR bersama, bagaimana seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun DIY dapat mengawal bahwa kesehatan wilayah itu menjadi satu titik point yang penting dan menjadi tanggungjawab kita bersama.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian informasi dari masing-masing peserta pertemuan dan diskusi terkait masalah – masalah apa yang kemungkinan akan berpotensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Materi diskusi diantaranya masalah kesiapan RS/Faskes untuk entry data pasien ke aplikasi New Allrecord.

Pengumpulan Data Terkait Layanan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit Covid Di Kabupaten Gunungkidul DIY Tahun 2020



Dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Kewaspadaan Dini Kejadian Penyakit tahun 2020, BBTCLPP Yogyakarta berencana untuk melakukan Kajian Sensitivitas dan Spesifisitas RDT Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul. Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, pada hari Kamis, 4 Juni 2020, Kepala BBTCLPP Yogyakarta, DR. dr. Irene, M.K.M. didampingi oleh Kepala Bidang SE, Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes., dan Epidemiolog Muda, dr. Dwi Amalia, M.P.H., mengunjungi kantor Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul. Tim BBTCLPP Yogyakarta ditemui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul, dr. Dewi Irawaty, M.Kes, Kepala Bidang P2P dr. Sumitro M.Sc, dan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, drg. Fransisca Niken Widyawati.

Pada pertemuan tersebut didiskusikan mengenai penelusuran kontak terhadap dua kasus konfirmasi terbaru di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan, pada penelusuran kontak telah dilaksanakan pemeriksaan RDT terhadap 271 kontak dari kedua kasus konfirmasi tersebut dengan hasil delapan kontak teridentifikasi reaktif. Sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, akan dilakukan pemeriksaan RDT ulang terhadap 271 kontak tersebut pada hari kesepuluh. Diambil kesepakatan untuk melaksanakan kajian uji sensitivitas dan spesifisitas RDT pada pemeriksaan ulang RDT tersebut. Dalam rangka mempersiapkan petugas Dinas Kesehatan/Puskesmas untuk melakukan pengambilan sampel swab nasofaring/orofaring, BBTCLPP Yogyakarta akan melakukan On The Job Training pada tanggal 11 Juni 2020 terhadap 31 petugas laboratorium/surveilans di Kabupaten Gunungkidul.

Pembahasan Sosialisasi Dan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum



Dalam rangka menjaga jaminan mutu kualitas air minum aman diperlukan penguatan peran dukungan layanan laboratorium kualitas air yang kompeten dan terpenuhi di setiap wilayah, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan teleconference pertemuan Pembahasan Sosialisasi dan Pemanfaatan data jejaring laboratorium dalam pengawasan kualitas air minum secara daring pada tanggal 5 Juni 2020.

Peserta pertemuan terdiri dari empat BBLK Se-Indonesia, sepuluh B/BTKLPP Se-Indonesia, Balai Labkes DKI Jakarta, Direktorat Kesling Ditjen Kesmas, dan WHO Indonesia. Peserta dari BBTCLPP Yogyakarta diikuti oleh Dr. dr. Irene, MKM (Kepala BBTCLPP Yogyakarta), Feri Astuti, ST, MPH (Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan), Dien Arsanti, SKM, M. Env (Kepala Seksi Lingkungan Biologi), Dhelina Auza Utami, S.Farm, Apt (Kepala Sub Bagian Program dan Laporan) dan Mardiansyah, S. Kom, M.P.H (Fungsional Pranata Komputer).

Acara dibuka dengan arahan Direktur Kesehatan Lingkungan, dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO. Disampaikan mengenai perlunya Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) yang dilakukan oleh internal dan external untuk menjamin kualitas air minum. Pada kesempatan ini beliau berharap dengan adanya pertemuan ini dapat dijadikan sebagai identifikasi awal dalam rangka sinkronisasi pemanfaatan data kualitas air minum dari setiap satuan kerja yang telah melakukan kegiatan surveilans kualitas air minum yang nantinya data tersebut dapat dijadikan sebagai suply data kualitas air minum pada tingkat nasional.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yaitu: Prof. DR. Ignatius Dwi Atmana Sutapa, M.Sc, Ir. Arief Sudrajat, MIS, PhD dan Bambang Wispriyono, PhD. Materi yang disampaikan terkait pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum, pengelolaan risiko, dan hasil kajian mengenai kualitas air minum. Acara dilanjutkan dengan diskusi dimana peserta menyampaikan mengenai pelaksanaan surveilans kualitas air minum secara aktif dan pasif yang dilakukan dimasing-masing satker serta kendalanya. Pertemuan akan dilanjutkan kembali minggu depan untuk membahas lebih detail mengenai dukungan laboratorium dalam pelaksanaan surveilans kualitas air."

Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam PKAM



Pertemuan pemanfaatan data jejaring laboratorium dalam Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM), yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 9 Juni 2020, merupakan lanjutan dari pertemuan Sosialisasi dan Pemanfaatan data jejaring laboratorium dalam pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2020 oleh Direktorat kesling, Ditjen Kesmas.

Peserta pertemuan terdiri dari empat BBLK Se-Indonesia, sepuluh B/BTKLPP Se-Indonesia, Balai Labkes DKI Jakarta, Direktorat Kesling Ditjen Kesmas, dan Komite Ahli Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Peserta dari BBTCLPP Yogyakarta diikuti oleh Dr. dr. Irene, MKM (Kepala BBTCLPP Yogyakarta), Feri Astuti, ST, MPH (Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan), Dien Arsanti, SKM, M. Env (Kepala Seksi Lingkungan Biologi) dan Mardiansyah, S. Kom, M.P.H (Fungsional Pranata Komputer).

Tujuan pertemuan adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi surveilans kualitas air minum baik dari format isian data kualitas air minum sampai format laporan/informasi yang akan disampaikan. Identifikasi ini juga memperhatikan sistem informasi yang sudah ada/berjalan pada setiap satuan kerja agar tidak ada proses duplikasi entry data kualitas air minum pada sistem yang akan dibangun nantinya hingga kemungkinan proses integrasi data antar sistem yang sudah ada.

Acara dipandu oleh Kepala Seksi Penyehatan Air, Widya Utami, dimulai dengan presentasi dari beberapa Satker yang diawali dengan dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr. dr. Irene, MKM. Pada kesempatan ini Ibu Irene menyampaikan bahwa BBTCLPP Yogyakarta saat ini telah membangun dan mengimplementasikan aplikasi eSIMDADU (elektronik Sistem Manajemen Data terpadu). Pada aplikasi berbasis web base ini, pengelolaan contoh uji baik dari pelanggan (pasif) dan kajian (aktif) telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini mulai dari proses registrasi contoh uji, distribusi contoh uji, input hasil uji, review hasil uji, verifikasi hasil uji hingga pencetakan sertifikat hasil uji (LHU) secara online dan realtime. Pada aplikasi eSIMDADU ini tersedia menu pengelolaan pelaporan hasil uji berupa informasi jumlah sampel uji, informasi kualitas hasil contoh uji, informasi sebaran contoh uji berdasarkan wilayah. Pada kesempatan presentasi ini informasi yang ditampilkan adalah informasi kualitas air minum dan air bersih per parameter (fisika, kimia dan baktaerologi) yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada periode waktu (bulanan, triwulan, tahunan) dan setiap level wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan) di wilayah layanan BBTCLPP Yogyakarta yaitu di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). Hingga saat ini telah ada beberapa B/BBTCLPP yang melakukan replikasi aplikasi eSIMDADU BBTCLPP Yogyakarta ini antara lain BTKLPP Palembang (proses implementasi), BTKLPP Medan (proses implementasi), BTKLPP Manado (proses instalasi/persiapan implementasi), BBTCLPP Jakarta (proses instalasi, persiapan implementasi), BBTCLPP Jakarta (proses instalasi).

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari beberapa satker yang lain diantaranya dari BBLK Makasar dan BBTCLPP Surabaya. Proses ini diikuti oleh Narasumber yaitu Ir. Arief Sudrajat, MIS, PhD yang merupakan komite ahli Kemenkes mengenai masalah kesehatan lingkungan dan Dr. Sonny Warouw, SKM, M.Kes, Kepala Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Dit Kesling. Dari paparan tersebut, teridentifikasi bahwa sebagian besar satuan kerja belum menggunakan aplikasi khusus dalam pengelolaan contoh uji, sehingga memerlukan proses pengolahan tersendiri. Terkait hal tersebut ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti agar pemanfaatan data jejaring laboratorium dalam PKAM dapat optimal yaitu perlunya kemudahan dalam akses data dan pembentukan Pokja pengelolaan data, untuk hal ini akan dikoordinasikan dengan Ditjen P2P agar tidak tumpang tindih dengan Pokja yang ada.

Di akhir acara Ibu Ely Setyawati, Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, menyampaikan bahwa diharapkan Penyelenggara air minum secara aktif melaporkan kualitas air nya kepada dinas kesehatan dan surveilans aktif dari dinas kesehatan ke penyelenggara air minum, serta data kualitas air minum dapat dilakukan pengolahan untuk menjadi potret kualitas air minum secara nasional selain itu data yang didapat tersebut dapat juga untuk review baku mutu, perbaikan program kualitas air minum nasional.

Pengumpulan Spesimen Dan Data S3JE

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Surveilans Sentinel Japanese Encephalitis (S3JE), telah dilakukan pengumpulan spesimen berupa serum darah dan data suspek JE di Bulan Juni 2020. Kegiatan S3JE dilaksanakan di DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dengan sentinel di DIY yaitu RSUP dr. Sardjito dan di Jawa Tengah RUSP dr. Kariadi. Spesimen yang diperoleh akan diperiksa terhadap IgM spesifik JE dengan metode ELISA di Laboratorium BBTCLPP Yogyakarta. Hasil pemeriksaan sampel dan pengolahan data suspek JE akan menghasilkan informasi epidemiologi mengenai kasus JE di Jawa Tengah dan DIY.



Pengumpulan spesimen di RSUP Dr Sardjito dilakukan pada tanggal 11 Juni 2020 dan dilaksanakan oleh Indah Setyorini, S.T., M.Kes, Atikah Mulyawati, S.K.M., dan Yeni Yuliani. Dari RSUP dr. Sardjito diperoleh 15 sampel dari 13 suspek JE untuk periode waktu bulan Februari-April 2020. Sedangkan di RSUP Dr. Kariadi Semarang pengumpulan spesimen dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Anjas Wulansari, S.K.M., M.P.H, dan Yeni Yuliani. Kepala Bidang ADKL, Feri Astuti, S.T., M.P.H, berkesempatan memimpin langsung proses pengumpulan Spesimen di RSUP dr. Kariadi. Diperoleh 10 spesimen dari 9 pasien suspek JE yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi pada periode Bulan Februari-April 2020.

Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul D.I.Yogyakarta Tahun 2020



Pelaksanaan Surveilans Faktor Risiko Penyakit Potensial KLB di Kabupaten Gunungkidul rangka rangka penanganan COVID-19 dilaksanakan di Puskesmas Karangmojo II. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari kamis – Jumat tanggal 11 dan 12 Juni 2020 merupakan kegiatan untuk Kontak Tracing dan Screening dari cluster pedagang ikan yang positif COVID 19. Pada hari pertama, DR. dr. Irene, M.K.M. didampingi oleh Kepala Bidang SE (Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes.), kepala seksi advokasi dan KLB (Heni Amikawati, SKM), Epidemiolog Muda (Imam Wahyudi, SKM, M.P.H.) dan tim laboratorium bersama-sama Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul (dr. Dewi Irawaty, M.Kes), dan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi (drg. Fransisca Niken Widyawati) ke Puskesmas Karangmojo II ditemui kepala puskesmas ibu Purwanti, SKM, MM untuk memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan rapid test menggunakan RDT dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan RDT dan swab pada hari pertama dilakukan sebanyak 166 orang dengan hasil reaktif sebanyak 6 orang.

Pada hari jumat, 12 Juni 2020, dilaksanakan pemeriksaan rapid test sebanyak 126 responden yang reaktif sebanyak 11 responden dan pemeriksaan swab sebanyak 178 responden yang terdiri dari 165 responden merupakan swab ke dua, 11 responden merupakan swab pertama (hasil RDT reaktif) dan 2 responden dari keluarga kasus positif COVID-19.

Dalam kegiatan ini diharapkan dapat segera memutuskan rantai penularan Covid-19 di masyarakat juga sekaligus akan meningkatkan cakupan pemeriksaan swab bagi penduduk resiko serta bisa dilakukan sebagai evaluasi terhadap sensitivitas serta spesivitas penggunaan alat diagnostic (RDT) yang dipergunakan sebagai alat screening. Kegiatan ini berjalan lancar dengan pembagian tugas untuk pemeriksaan RDT dilaksanakan oleh petugas laboratorium Puskesmas dan Dinas Kesehatan Gunung Kidul, pengambilan swab dilakukan oleh petugas laboratorium Puskesmas dan Dinas Kesehatan Gunung Kidul yang sudah dilakukan On The Job Training oleh BBTKLPP Yogyakarta dengan didampingi oleh petugas laboratorium BBTKLPP Yogyakarta. Sedangkan pemeriksaan swab dilakukan oleh laboratorium BBTKLPP Yogyakarta. Untuk menggali informasi kontak responden reaktif terhadap kasus positif dilaksanakan oleh epidemiolog BBTKLPP Yogyakarta, petugas surveilans Dinkes Gunungkidul dan puskesmas Karangmojo II.

Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Data Jejaring Laboratorium Dalam PKAM



Upaya meningkatkan dan menyiapkan capaian target laboratorium untuk melakukan 20.000-30.000 tes PCR per hari sesuai arahan presiden, pada hari Jumat, 12 Juni 2020, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK melaksanakan rapat koordinasi via vicon untuk menyampaikan beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, perwakilan Dirjen P2P Kemenkes, perwakilan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Badan PPSDM Kemenkes, Kepala Badan Litbangkes Kemenkes, Kepala Logistik Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Deputi Tanggap Darurat BNPB, Kepala Umum PERSI, Kepala Umum ADINKES, Kepala Umum ARSSI, Ketua Umum ARSADA, Ketua Umum Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, perwakilan Lembaga Biologi Molekular Eijkman, serta beberapa rumah sakit, UPT Kemenkes, dan universitas yang tergabung dalam jejaring laboratorium Covid-19.

Perwakilan dari BBTCLPP Yogyakarta adalah Kepala Balai, Ibu DR. dr. Irene, M.K.M., Kepala Bidang PTL Ibu Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc, Kepala Bidang SE Bp. Sayekti Udi Utama, S.K.M., M.Kes. dan Kasie Pengkajian dan Diseminasi Ibu dr. Yohanna Gita Chandra, M.S. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa :

1. Mengingat sudah kesepakatan Satu Data untuk laboratorium, semua kab/kota harap segera mengakses aplikasi allrecord untuk pengiriman sampel karena beban lab sudah sangat berat untuk mengisi administrasi tersebut.
2. Perjelas identitas sampel dengan mengisi data selengkap-lengkapnyanya termasuk NIK pasien.
3. Sebaiknya ada pemisahan sampel yang berasal dari hasil swab dari rumah sakit dengan sampel dari hasil tracing.
4. Sampel dari RS harus diprioritaskan pemeriksaannya dan segera disampaikan hasilnya kembali ke RS, terkait dengan penetapan status perawatan dan kasus meninggal.
5. Mengingat banyaknya kejadian petugas kesehatan terpapar COVID 19, maka semua petugas pengambil swap, pengelola laporan dan pengelola limbah medis harap mentaati SOP masing-masing.
6. Pimpinan laboratorium harap melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SOP di masing-masing tahapan.
7. Pelatihan tenaga laboratorium harap melibatkan pelatih-pelatih dari Balitbangkes, BBTCL, BBLK dan Universitas yang sudah terbiasa melayani lab untuk pelayanan kesehatan.
8. Menegaskan kembali bahwa untuk pembiayaan lab rujukan hasil tracing tidak dikenakan biaya, khusus untuk pemeriksaan mandiri dapat dikenakan sesuai tarif yang berlaku.
9. Kemenristek Dikti akan meyorati laporan apa-apa saja yang sudah dilakukan kepada Kemenkes dan akan dilaporkan juga kepada Deputi III Kemenko PMK.
10. Semua fasilitas lab dapat mengusulkan kebutuhan consumable ke Gugus Tugas BNPB atau Balitbangkes dengan spesifikasi yang jelas.

Webinar Internasional Perkembangan Dan Pengembangan Metoda Surveilans Vektor Berbasis Molekuler



Pada tanggal 13 Juni 2020 telah diselenggarakan Webinar Internasional melalui aplikasi Zoom dan kanal Youtube dengan tema Perkembangan dan Pengembangan Metoda Surveilans Vektor Berbasis Molekuler. Pemilihan tema dan pelaksanaan webinar ini didasari pemikiran terhadap beberapa hal berikut:

- a. Penyakit tular vektor nyamuk (mosquito borne-diseases), terutama malaria hingga saat ini masih menjadi penyakit prioritas dikendalikan di Indonesia, juga di dunia. Di tahun 2018 tercatat 228 juta kasus malaria di dunia, dengan incidence rate (IR) 57 per seribu penduduk. Kasus malaria di Indonesia yang terangkum dalam kasus malaria di wilayah regional Asia Tenggara turut berkontribusi terhadap tingginya IR malaria di dunia. Malaria di dunia tahun 2018 telah mengakibatkan kematian pada 405.000 penderita.
- b. WHO merekomendasikan dua strategi utama pencegahan dan pengendalian malaria, salah satunya adalah pengendalian vektor - pengendalian pada nyamuk penular malaria (*Anopheles* sp). Disebutkan WHO bahwa pengendalian vektor malaria dengan intervensi utama berupa penggunaan kelambu berinsektisida – long lasting insecticidal nets (LLINs) dan penyemprotan dinding dalam rumah dengan insektisida – indoor residual spraying (IRS) telah berkontribusi signifikan menurunkan kasus dan kematian akibat malaria di dunia (WHO, 2018).
- c. Pemilihan metoda pengendalian vektor berupa penggunaan LLINs dan atau IRS, itu harus didasarkan bukti entomologis vektor malaria di wilayah setempat. Dalam hal ini, kemampuan Entomolog Kesehatan atau petugas lain yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan (surveilans) dan pengendalian vektor sangat menentukan keberhasilan program pengendalian vektor.
- d. Entomolog Kesehatan atau pelaksana kegiatan pengamatan dan pengendalian vektor harus benar-benar memahami vektor yang akan dikendalikan, meliputi informasi spesies apa yang berperan sebagai vektor di wilayah kerjanya, bagaimana karakteristik bionomik vektornya, terutama menyangkut perilaku/kebiasaan populasi vektor di dalam mencari pakan/darah, yaitu apakah lebih senang menggigit pada manusia (antropofagik) atau pada binatang (zoofagik), lebih suka menggigit manusia di dalam rumah (endofagik) atau di luar rumah (eksofagik), lebih senang mencari tempat beristirahat di dalam rumah (endofilik) atau di luar rumah (eksofilik), serta bagaimana status kerentanannya terhadap insektisida yang digunakan program pada IRS dan LLINs (masih rentan atau sudah mulai toleran).
- e. Informasi entomologis yang diperlukan seringkali tidak cukup tersedia di unit kerja, mulai di tingkat puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi serta di Unit Utama (Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit) akibat adanya faktor penghambat, antara lain masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Entomolog Kesehatan atau petugas terkait terhadap: perkembangan metoda atau teknik terbaru dalam hal teknik sampling nyamuk, penentuan spesies, konfirmasi spesies vektor, dan deteksi resistensi vektor terhadap insektisida yang saat ini mulai banyak mengarah pada pemeriksaan berbasis molekular. Terlebih dalam hal Barkoding DNA nyamuk vektor malaria, yang saat ini tampaknya belum menjadi prioritas, sementara informasi tentang Barcode DNA vektor malaria merupakan hal krusial dikembangkan, terutama dalam rangka:
 - Penyediaan bank data (referensi) keragaman spesies vektor malaria di Indonesia, sekaligus menjadi referensi dalam mengidentifikasi spesimen yang menemukan kendala dalam identifikasi secara mikroskopis berdasarkan karakter morfologis, sehingga identifikasi harus ditetapkan berdasarkan pemeriksaan secara molekular - berdasarkan karakter genotipe (susunan nukleotida DNA gen target).
 - Adanya database genotipe spesies vektor malaria di Indonesia akan memudahkan stakeholder terkait dalam mengklaim adanya invasi spesies impor, atau sebaliknya, dapat mengkonter klaim negara luar tentang adanya spesies vektor impor dari negara kita.
- f. Dengan terus berkembangnya metoda/teknik molekular dalam pemeriksaan vektor menuntut SDM Entomolog kesehatan atau praktisi di bidang entomologi kesehatan untuk terus meningkatkan kemampuan teknisnya dengan cara mengikuti setiap perkembangan yang ada.
- g. Webinar menjadi salah satu solusi, yaitu dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi Entomolog Kesehatan maupun fungsional terkait lainnya dalam surveilans vektor berbasis molekular, juga bagi stakeholder terkait di dalam evaluasi dan penentuan kebijakan surveilans dan pengendalian vektor ke depannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka organisasi profesi Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI) Cabang DIY-Jateng, yang difasilitasi dan didukung oleh Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Direktorat P2PTVZ Kemenkes RI, WHO untuk Indonesia, PEKI Pusat dan BBTCLPP Yogyakarta telah menyelenggarakan Webinar Internasional dengan Tema yang disebutkan di atas.

Antusias pendaftar sangat tinggi, terlihat dari jumlah pendaftar mencapai 2.947 orang dari 3.000 kuota. Webinar dimulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 12.10, atau melampaui dari batas waktu yang ditetapkan (11.30 WIB). Acara dipandu oleh MC Dr. Andiyatu, SKM, M.Si, Entomolog Kesehatan Ahli dari BBTCLPP Yogyakarta, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Webinar dan Ketua PEKI Jateng-DIY. Ada tiga pokok acara yang dilaksanakan dalam webinar ini, yaitu: pertama, Pembukaan yang diawali dengan sambutan dari Ketua Umum PEKI Pusat - Bpk. Dr. Suwito, SKM, M.Kes, disusul sambutan dari WHO untuk Indonesia – Ibu Sereene Joseph, Ph.D dan sambutan sekaligus pembukaan webinar secara resmi oleh Direktur P2PTVZ, Ibu dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Acara kedua, yaitu paparan materi dari 4 (empat) narasumber, yaitu: (1) Bpk. William A. Hawley, Ph.D, MPH – Kepala Subdit. Vektor dari CDC Atlanta dengan topik materi Teknik Sampling dan Analisis Vektor, (2) Bpk. Prof. Din Syafruddin, Ph.D dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta dengan topik Mosquito Species Identification: The use of Molecular Methods, (3) Bpk. Prof. Rosichon Ubaidillah, M.Phil, Ph.D – Profesor Riset Bidang Zoologi dari LIPI Jakarta dengan topik Pengembangan Barcode DNA sebagai Penanda Spesies Nyamuk, dan (4) Adeline Chan, MPH, Ph.D, – Divisi Penyakit Parasitik, CDC Atlanta dengan topik Metoda dan Analisis Uji Resistensi Nyamuk Secara Moekular. Paparan materi dilakukan secara panel oleh empat narasumber dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator Bpk. Prof. Momammad Sudomo, Ph.D. Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Ahli Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, juga sebagai Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes. RI.

Setelah sesi paparan materi dan sesi tanya jawab berakhir, acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus penutupan webinar secara resmi yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, Ibu Dr. dr. Irene, MKM, yang juga sebagai salah satu Pelindung/Penasihat dari PEKI Jateng-DIY.

Proses penyelenggaraan webinar ini berjalan lancar, yang tentu tidak terlepas dari bantuan fasilitasi teknologi dan informasi (IT) dari Host/Co-host WHO Indonesia (Ibu dr. Herdiana, M.Epid dan Team) dan dari Kepala BBTCLPP Yogyakarta bersama jajarannya, yakni Kepala Bagian Tata Usaha (Dian Trikoriati, SKM, MPH), Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi (Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes), Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (Indah Nur Haeni, S.Si, M.Sc), Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (Feri Astuti, ST, MPH), Instalasi Teknologi Informasi (Mardiansyah, S.Kom, M.P.H bersama tim teknis), serta anggota panitia penyelenggara webinar, baik yang dari BBTCLPP Yogyakarta (Y. Didik Setiawan, S.Si, M.Si dan Yuli Padmasari, Amd.K), Dinas Kesehatan DIY (Rega Dharmawan, SKM), FKM UNDIP Semarang (Retnoningsih), Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Widonarto, ST), Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Erna Handayani, SKM, M.Sc), Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lejar Pribadi, S.Si), IT PEKI (Fajar Isnaini, SKM) dan dari KKP Kelas I Yogyakarta (Suzana Dewi Agustjahjani, SKM).

Pengambilan Sampel Polio Lingkungan Di Ipal Semanggi Surakarta

Pada tanggal 15 Juni 2020 telah dilakukan pengambilan sampel polio lingkungan berupa limbah cair domestik IPAL Semanggi, Kabupaten Surakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Eradikasi Polio (ERAPO) dengan memantau apakah terdapat virus polio liar di lingkungan yang terbuang melalui sistem ekskresi manusia.



Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan sejak tahun 2017. Pada tahun 2019 kegiatan dilakukan 2 (dua) kali sebulan di IPAL Sewon Bantul, DIY. Untuk tahun 2020 ditambah lokasinya di IPAL Semanggi Surakarta sesuai wilayah kerja BBTCLPP Yogyakarta yaitu DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas dari Laboratorium Biologi Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta Ika Purwanti, SSi didampingi oleh pengelola IPAL Semanggi antara lain Bapak Nuryanto. Dalam kegiatan ini juga dilakukan supervisi oleh Ibu Kepala BBTCLPP Yogyakarta Dr. dr. Irene, MKM dan Kasi Teknologi Laboratorium Nila Cakrawati, ST, MSc dalam rangka penguatan laboratorium, dimana diharapkan agar pengambilan dan penanganan dilakukan sesuai prosedur yang sesuai, sehingga hasil pengujian sesuai keadaan yang sebenarnya. Sampel yang diambil nantinya akan dipacking sesuai prosedur yang sesuai dan dikirimkan ke Laboratorium Bio Farma Bandung melalui jasa ekspedisi.

Zoom Meeting Penguatan Jejaring Laboratorium PCR Di Jawa Tengah



Pertemuan virtual penguatan jejaring rujukan laboratorium PCR Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juni 2020 Pukul 08.00 s.d 10.30. Acara dihadiri langsung oleh Ka. Dinkes Prov. Jawa Tengah dr. Yulianto Prabowo, M.Kes dengan Narasumber Kapuslitbang Biomedis dan Kesehatan Dasar Kemenkes RI Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed dan Pembahas Ketua Tim Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah dr. Anung Sugihantono, M.Kes. Seluruh peserta dihadiri oleh seluruh penanggung jawab jejaring rujukan Lab PCR Jawa Tengah, diantaranya adalah perwakilan dari kesmas Dinkes Jateng, perwakilan dari RS Wongsonegoro, perwakilan dari Yankes Dinkes Provinsi Jateng, Perwakilan dari Puslitbang BTDK, perwakilan dari Balkesmas Ambarawa dan beberapa rumah sakit dan laboratorium yang bergabung dalam jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 di Jawa Tengah. BBTCLPP Yogyakarta dihadiri langsung oleh Kepala Balai Ibu Dr. dr. Irene, MKM, Kepala Bidang PTL Ibu Indah Nur Haeni, SSI, MSc dan Kepala Bidang SE Bp. Sayekti Udi Utama, SKM, MKes.

Dalam pembukaan sekaligus arahannya Bp. dr. Yulianto Prabowo, M.Kes mengucapkan banyak terimakasih atas diselenggarakannya acara ini untuk mendukung apa yang telah menjadi kebijakan nasional yaitu percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dalam arahannya beliau juga menyampaikan terimakasih kepada BBTCLPP Yogyakarta karena yang pertama menjadi pioner selain Balitbangkes dalam mengampu pemeriksaan sampel Covid-19 di Jawa Tengah. Saat ini sudah datang mesin ekstraksi otomatis ke beberapa laboratorium dan sedang proses penyelesaian pengadaan mesin ekstraksi otomatis untuk mendukung pengujian di BBTCLPP Yogyakarta. Semoga semuanya dapat mendorong percepatan pemeriksaan yang targetnya 3.500 /1.000.000 penduduk dan pemeriksaan tidak hanya dikonsentrasikan di kota – kota besar saja tetapi juga di daerah – daerah. Harapannya dari laboratorium PCR yang saat ini sudah berjalan agar bisa ditingkat terus sesuai surat edaran dari Dirjen P2P, dan paling tidak 22 Rumah sakit dan laboratorium pemeriksa bisa mengupdate pemeriksaan PCR COVID-19 ke dalam aplikasi new allrecord.

Acara dilanjutkan paparan yang disampaikan oleh Narasumber Kapuslitbang Biomedis dan Kesehatan dasar Kemenkes RI Dr. dr. Vivi Setiawaty, M.Biomed. Beliau menyampaikan capaian target pemeriksaan COVID-19 per hari dengan RT-PCR dan mengharapkan dilakukan percepatan pemeriksaan karena telah terjadi penumpukan di Jawa Tengah. Acara terakhir diskusi terkait kendala dan permasalahan dalam penanganan pemeriksaan COVID yang dipimpin oleh Ketua Tim Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

Zoom Meeting Kamis Pahingan dengan Tema Monitoring dan Konfirmasi Data Capaian Output Tahun 2020 dan Redesain Sistem Penganggaran Tahun 2021

Kamis, 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB BBTCLPP Yogyakarta berpartisipasi dalam Zoom Meeting Kamis Pahingan dengan Tema Monitoring dan Konfirmasi Data Capaian Output Tahun 2020 dan Redesain Sistem Penganggaran Tahun 2021, yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi DIY. Sesuai tema yang disampaikan BBTCLPP Yogyakarta diwakili oleh Dhelina Auza Utami selaku Kasubbag Program dan Laporan, Siswati Elyna Tarigan dan Nadia Regina Martanti selaku fungsional Perencana serta Dani Martanto dan Erna Yunita selaku fungsional di bagian Keuangan.

Acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY Heru Pudyo Nugroho. Beliau menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Satker dan Stakeholder terkait yang tetap kooperatif dan bersinergi dengan baik dalam menghadapi kondisi Pandemi Covid-19. Dalam arahannya Beliau menyampaikan meskipun terdapat Relaksasi penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19, monitoring capaian output sebagai bagian dari pengukuran IKPA tetap harus dilaksanakan untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan anggaran.



Kualitas data capaian output tahun 2019 yang diisi oleh Satker dinilai sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun masih terdapat data yang dinilai tidak wajar (anomali) dengan jumlah yang masih tinggi sehingga capaian output belum dapat secara maksimal dianalisis lebih lanjut dan menghasilkan rekomendasi atau tindak lanjut yang tepat. Pada tahun 2020 ini dilakukan perbaikan sistem dan proses bisnis dengan memasukkan indikator Konfirmasi Capaian Output (KCO) sebagai salah satu objek penilaian dalam IKPA, penguatan peran KPPN dalam monitoring dan konfirmasi data, dan penyempurnaan aplikasi SAS, SAKTI, e-Rekon&LK, OM-SPAN dan SMARTDJA.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber 1, Kepala Subdit Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Ibu Heny Muryantini. Beliau menghimbau satker dapat menginput data capaian output sesuai perkembangan yang terjadi karena hal tersebut sangat diperlukan sebagai masukan dan perbaikan penganggaran K/L.

Pemaparan Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II, Bapak Tommi Helmiwan. Beliau menyampaikan materi terkait Monitoring dan konfirmasi data capaian Output, bahwa KCO dihitung secara bulanan berdasarkan rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satker. Output yang terkonfirmasi adalah data output yang dinilai wajar (rasional/tidak bersifat anomali). Data capaian output merupakan kewenangan satker (PPK), sehingga KCO diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan satker dan kualitas capaian output. Saat ini sedang dikembangkan simplifikasi capaian output dengan single entry point, sehingga satker cukup melakukan pengisian data capaian output pada aplikasi SAS atau SAKTI dan akan terinterkoneksi dengan Aplikasi SMART DJA. Beliau juga menggarisbawahi bahwa perhitungan capaian output merupakan kebijakan dan kewenangan masing-masing K/L atau Satker berdasarkan metode perhitungan yang ditentukan oleh instansi vertikal maupun oleh Satker sendiri, seharusnya Unit Eselon I K/L perlu membuat petunjuk teknis tata cara perhitungan capaian output pada Satker lingkup unit organisasinya. Namun demikian, Kementerian Keuangan dapat memberikan panduan untuk menjamin kualitas data yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Narasumber 3 Bapak Febrian Yalisman, pelaksana Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II, menyampaikan materi teknis mengenai cara pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS, aplikasi SAKTI, dan aplikasi e-Rekon&LK.

Secara garis besar prosesnya adalah Satker mengisi capaian output pada aplikasi SAS/SAKTI, Sakter mengunggah ADK Capaian Output ke e-Rekon&LK, selanjutnya KPPN akan memonitor, menganalisis dan mengkonfirmasi status data capaian output dari satker melalui e-Rekon&LK.

Materi terkait tema Redesain Sistem Penganggaran Tahun 2021, disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Danar Widanarko. Redesain Program dilakukan dengan mengacu kepada visi misi presiden, fokus pembangunan, dan RPJMN 2020-2024 serta dengan mengidentifikasi tugas dan fungsi utama K/L. Sistem Penganggaran akan mengalami perubahan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 antara lain jumlah Program hasil redesign akan menjadi lebih sedikit, namun lebih fokus dan lebih mencerminkan program-program nyata yang dilakukan oleh K/L. Redesain Program juga dilakukan dalam rangka memisahkan antara Program yang bersifat teknis dengan Program yang bersifat generik. Hasil Redesain Program, dari 428 Program Eksisting yang ada, setelah dilakukan redesign hanya menjadi 102 Program, dengan rincian 84 Program spesifik/ teknis KL dan 18 program generik/ lintas program

Pada setiap akhir sesi paparan materi berlangsung diskusi aktif melalui Chat Aplikasi maupun Audio Conference terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satker dan hal-hal yang dirasa kurang jelas terkait pemaparan para Narasumber

Sinergitas Laboratorium Pemeriksa Covid-19

Percepatan penanganan specimen Covid-19 memerlukan ketepatan tindakan dalam mengatasi situasi yang cepat berubah. Hal ini memerlukan kemitraan dan kerjasama dengan banyak pihak. Untuk meningkatkan sinergitas antara laboratorium pemeriksa, Dinas kesehatan dan RS rujukan pada hari kamis, 18 Juni 2020 pukul 07.30 WIB BBTCLPP Surabaya menyelenggarakan kegiatan webinar melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti sekitar 388 partisipan termasuk BBTCLPP Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang PTL Ibu Indah Nur Haeni, SSI, MSc, Kepala Bidang SE Bp. Sayekti Udi Utama, SKM, M.Kes, Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi Ibu dr. Yohanna Gita Chandra, MS dan Kepala Seksi Advokasi & KLB Ibu Heni Amikawati, SKM.



Webinar dibuka oleh Kepala BBTCLPP Surabaya. Dirjen P2P Bp. Achmad Yuriyanto turut memberikan arahan. Adapun narasumber webinar kepala BBTCLPP Jakarta sebagai perwakilan dari Laboratorium pemeriksa, Kepala Dinkes prov. NTB dan ketua Tim kuratif tugas covid -19 Jawa Timur sekaligus Direktur RD dr. Soetomo dr. Joni Wahyuhadi. Dalam arahannya Dirjen P2P mengajak untuk memahami situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Kunci penanganan pandemic covid ini adalah cari, temukan, isolasi dan rawat. Kunci ini menjadi peran penting bagi para petugas kesehatan. Isolasi adalah hal mutlak jika sudah ditemukan melalui jalan perawatan. Beliau juga meminta menyelesaikan permasalahan secara sinergitas, bermitra dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Webinar ini menyimpulkan bahwa semua pihak perlu meningkatkan pelayanan penanganan covid-19 secara bahu membahu. Kewaspadaan dan surveilans berbasis masyarakat untuk dapat terus ditingkatkan mengingat covid-19 merupakan penyakit self limiting disease yang ditularkan antar manusia.

Peran BBTCLPP Yogyakarta Sebagai Laboratorium Rujukan Pemeriksaan Dalam Swab Test Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Yang Melakukan Perjalanan Dari Wilayah Indonesia Dengan Transmisi Lokal Virus Covid-19



Dalam rangka deteksi dini penyebaran virus Covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya serta di dukung Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menyelenggarakan RT-PCR Test dengan metode swab secara gratis bagi warga Kabupaten Bantul yang pulang melakukan perjalanan dari wilayah Indonesia dengan transmisi lokal Virus Covid-19.

Acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 bertempat di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, diawali dengan penyampaian laporan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Agus Budi Raharja, S.K.M., M.Kes. Dalam laporannya disampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 agar bisa mencapai masa normal kembali. Sesuai arahan Gugus Tugas Covid-19, setiap daerah harus melaksanakan pemeriksaan screening RT-PCR test dari swab 5.000 per 1.000.000 penduduk. Dengan berperan serta dalam RT-PCR test dengan metode swab ini diharapkan masyarakat turut berkontribusi untuk keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar.

Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Bantul Drs. H. Suharsono. Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran Muspida Kabupaten Bantul, Anggota DPRD Bantul, OPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bantul serta Kepala BBTCLPP Yogyakarta (Dr. dr. Irene, M.K.M) dan Kepala Seksi Pengkajian dan Diseminasi (dr. Yohanna Gita Chandra, M.S.). Dalam sambutannya Bupati Bantul menyampaikan pentingnya kedisiplinan diri untuk mencapai Indonesia yang sehat, perlunya dukungan dan kerjasama dari para pelaku pelayanan kesehatan dan juga masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Pada bagian akhir sambutan beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala BBTCLPP Yogyakarta atas dukungannya terhadap kegiatan ini serta berharap kegiatan ini dapat segera memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 serta menghentikan Pandemi Covid 19 di Indonesia pada umumnya.

Sesuai pembukaan, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan pengambilan swab oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bersama dengan petugas Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid Bambanglipuro Bantul. Untuk selanjutnya specimen di periksa di Laboratorium rujukan pemeriksa Covid 19 BBTCLPP Yogyakarta.

Untuk memudahkan jangkauan layanan bagi masyarakat, mekanisme pendaftaran test swab ini bisa dilakukan dengan mempergunakan aplikasi detiksicorona.bantulkab.go.id/swabtest yang dirancang bersama-sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bersama Dinas Kominfo Kabupaten Bantul. Aplikasi tersebut bisa di akses oleh semua warga dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Bantul di manapun berada.

Melalui aplikasi tersebut bagi masyarakat yang berminat tinggal mengisi data diri serta riwayat perjalanan sebelumnya untuk selanjutnya system akan menyeleksi secara otomatis bagi masyarakat yang direkomendasikan untuk bisa mengikuti test swab pada tahap berikutnya. Pendaftaran online melalui aplikasi ini akan dibuka sampai dengan hari Rabu, 24 Juni 2020 jam 23.59 WIB atau akan tertutup secara otomatis setelah kuota terpenuhi.

Menurut rencana pelaksanaan test swab dibagi menjadi dua gelombang, yaitu :

Test swab gelombang I, Test swab akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Juni 2020 (Swab pertama) dan hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 (Swab kedua)

Test swab gelombang II, Test swab akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 (Swab pertama) dan hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 (Swab kedua)

Dalam pelaksanaan test swab tersebut, bagi penduduk Kabupaten Bantul yang lolos untuk pemeriksaan dipersyaratkan untuk datang pada jadwal yang telah ditentukan dengan membawa Kartu Identitas Diri (KTP), serta Bukti Pendaftaran dan Surat Pernyataan bermeterai sebagai pelaku perjalanan yang ditanda tangani oleh Kepala Dukuh atau kepala desa setempat.

Bimtek Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)



Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola SAKIP, BBTKLPP Yogyakarta mengirimkan 3 orang dari Tim Pengelola SAKIP BBTKLPP Yogyakarta dari sub Bagian Program dan Laporan yaitu Dhelina Auza Utami (Kasubbag Program dan Laporan), Siswati Elyna Tarigan (Perencana) dan Nadia Regina Martanti (Perencana) untuk mengikuti Bimtek Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah Link- Pemda bersama dukungan Kementerian Dalam Negeri – RI, Bappenas – RI dan Badan Pemeriksa Keuangan – RI. Bimbingan Teknis dilaksanakan di Fave Hotel Yogyakarta, selama 2 hari Kamis s.d Jum'at, 25 s.d 26 Juni 2020.

Hari pertama diawali dengan registrasi peserta, pembukaan serta pengantar materi akuntabilitas kinerja, dan dilanjutkan paparan materi serta diskusi sampai berakhir di hari kedua. Bimtek ini menghadirkan dua Narasumber inti yaitu Ibu Ari Sulistyorini, SIP., MSI, Kabid Pengembangan Kompetensi Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta dan Ibu P.heny dian A.,SH.,M.Hum, Analis Kebijakan Madya Pemkot Yogyakarta. Materi yang disampaikan antara lain terkait Akuntabilitas Kinerja, Kinerja, Indikator Kinerja dan Target, Cascading dan Pemanfaatan IT, serta pemilihan strategi dan efisiensi dalam perencanaan monitoring sampai dengan evaluasi yang banyak membuka wawasan baru terkait pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan termasuk penyusunan Laporan Kinerja yang mampu menginterpretasikan capaian kinerja. Selain paparan materi berlangsung diskusi aktif terkait isu-isu strategis, kendala-kendala dalam perencanaan dan evaluasi program serta alternatif-alternatif pemecahan yang bisa dilakukan di lapangan.

Dengan mengikuti Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Tim Pengelola SAKIP mendapatkan keahlian dalam mewujudkan pengelolaan SAKIP BBTCLPP Yogyakarta yang lebih akuntabel

Salam sehat

Workshop Satuan Kepatuhan Intern (SKI) Angkatan I

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan peran Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan (Itjen Kemenkes) menyelenggarakan workshop secara online menggunakan Aplikasi Zoom Meeting selama 2 hari berturut-turut. Workshop ini merupakan workshop Angkatan I, yang diselenggarakan pada hari Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2020. Pada kesempatan ini, beberapa pegawai BBTCLPP Yogyakarta mengikuti workshop tersebut, yaitu Kepala Balai, Dr. dr. Irene, M.K.M., pejabat struktural, pejabat fungsional madya, tim SKI, tim WBK, tim SPIP, tim PIPK.

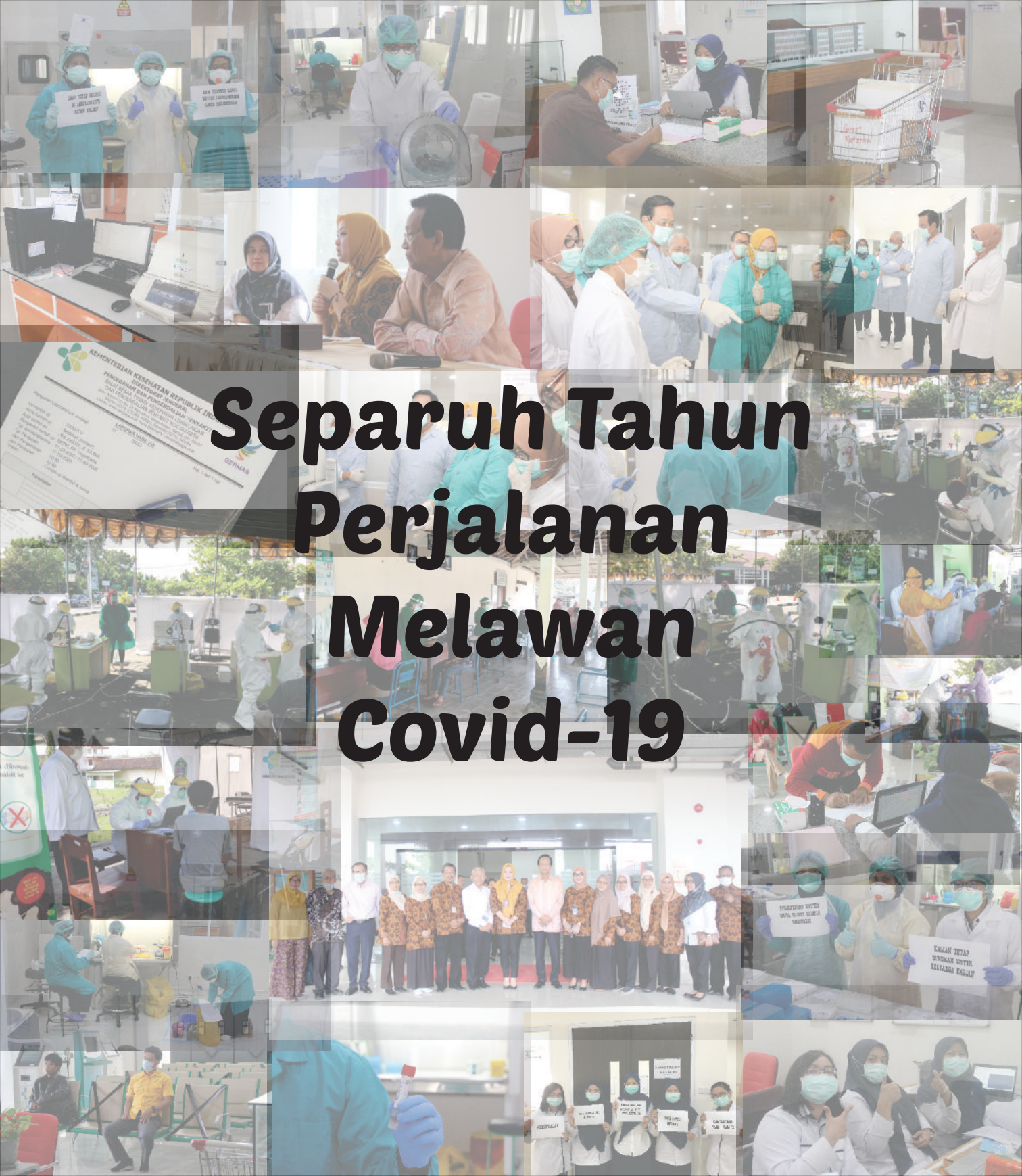
Acara pada hari pertama diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan sekaligus arahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, M.P.H. Beliau mengucapkan terima kasih kepada para peserta undangan yang telah hadir. Dalam arahannya, beliau menyampaikan ketidakpuasan Presiden RI terhadap kinerja Kemenkes, khususnya terhadap realisasi anggaran yang rendah, serta perencanaan penyusunan anggaran yang kurang cermat. Dalam menghadapi masa new normal tentunya pemulihan ekonomi sangat sulit dilakukan, sehingga perlu sikap serta pola pikir suatu perencanaan yang dapat dipertanggunggugatkan.

Lebih lanjut dalam arahannya, Irjen menyampaikan bahwa Itjen memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan satu per satu terhadap lebih dari 400 satker, sehingga dalam hal ini peran SKI sangat diharapkan dapat membantu. Pembentukan SKI di setiap satker haruslah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang teliti, mampu bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam mereviu mulai dari perencanaan anggaran. Ke depan Itjen akan lebih serius lagi dalam memantau dan mereviu, lebih peka terhadap kegiatan - bermanfaat atau tidak, masuk akal atau tidak. Reviu tidak lagi hanya 3E (Effectivity, Efficiency, dan Economic), tetapi 4E (Effectivity, Efficiency, Economic, dan Equality). Pada akhir arahannya, Irjen berharap ke depan tidak akan ada lagi pengaduan-pengaduan terkait realisasi anggaran. Seluruh satker memiliki orang-orang yang lebih profesional dan menjaga integritas satker dan Kemenkes. WTP tidak bisa menjamin kita bersih; jauhi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Sebagai penutup arahannya, beliau berpesan agar kita bisa menjaga uang di satker walaupun itu hanya satu sen, yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat.



Setelah sambutan dan arahan Irjen, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi-materi oleh narasumber dan diskusi/tanya jawab. Pada setiap sesi pemaparan, seluruh Inspektur-Inspektur juga hadir sebagai pembahas. Dengan berakhirnya pemaparan terakhir pada hari kedua, seluruh rangkaian acara ditutup oleh Inspektur III, Bapak Heri Radison, SKM, MM.

Melalui workshop, diharapkan dapat meningkatkan penguatan satker dalam menerapkan tata kelola yang baik melalui penilaian/reviu internal yang dikomando tim SKI, baik dalam perencanaan, PBJ, laporan keuangan, maupun PIPK.



Separuh Tahun Perjalanan Melawan Covid-19



ANDA TERBUKA LUNGA
SERTA LANGKAH
SAMA MELAWAN
COVID-19

BERSAMA SAMA
MELAWAN
COVID-19

SALAH SATU
CARA TERBAIK
DALAM MENYANGAT
KEBERHASILAN

Covid-19
tidak ke

BERKESAMBUNGAN
SALAH SATU
CARA TERBAIK
DALAM MENYANGAT
KEBERHASILAN

BERKESAMBUNGAN
SALAH SATU
CARA TERBAIK
DALAM MENYANGAT
KEBERHASILAN

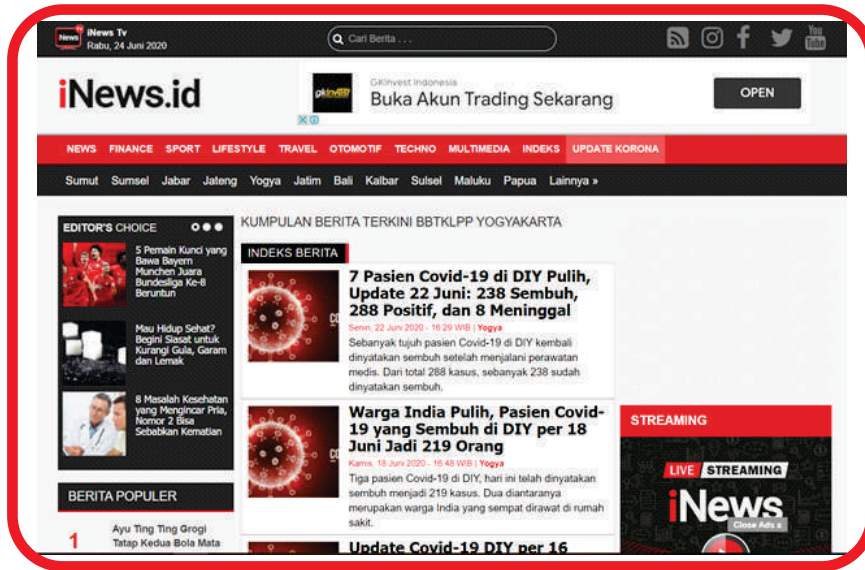
“BBTKLPP YOGYAKARTA DALAM MEDIA MASSA”

“



”





“



Update Covid-19 DIY per 16 Juni: Positif Tambah 1 Jadi 273 Kasus, 213 Orang Sembuh

Selasa, 16 Juni 2020 - 16:39 WIB | **Yogya**

Seorang warga Gunungkidul yang baru pulang dari Surabaya, positif Covid-19. Temuan ini menjadikan kasus Covid-19 di DIY bertambah menjadi 273 kasus.



Usai Lahirkan Bayi, Ibu Muda dari Jakarta Positif Covid-19

Jumat, 05 Juni 2020 - 17:56 WIB | **Yogya**

Seorang ibu muda asal Yogyakarta yang baru saja melahirkan, positif Covid-19 setelah pulang dari Jakarta. Update Covid-19 per 5 Juni ada 238 kasus positif.



Update Covid-19 di DIY 4 Juni: 237 kasus, 175 Sembuh dan 8 Meninggal

Kamis, 04 Juni 2020 - 16:30 WIB | **Yogya**

Kasus Covid-19 di DIY stagnan. Selama tiga hari berturut-turut, tidak ada penambahan kasus baru dengan total 237 kasus, 175 sembuh dan 8 meninggal.



Dua Hari Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 di DIY

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:04 WIB | **Yogya**

Selama dua hari tidak ada penambahan pasien positif Covid-19 di DIY. Jumlahnya tetap 237 kasus, sedangkan pasien yang sembuh 171 orang dan 8 meninggal.

”

“



”

“

Sultan HB X berharap BBTCLPP Yogyakarta percepat penanganan COVID-19

© Rabu, 18 Maret 2020 18:32 WIB



“Harapan saya (uji sampel) pasien di Yogyakarta dan Jawa Tengah cukup bisa diselesaikan di tempat ini”

Bantul (ANTARA) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap Raja Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul mampu membantu mempercepat penanganan kasus COVID-19 di DIY.

“BBTKLPP Yogyakarta itu berdasarkan Keputusan Menteri dimungkinkan kita bisa menerima sampel untuk virus corona (COVID-19)” kata Sultan saat jumpa pers peluncuran BBTCLPP Yogyakarta, di Jalan Imogin Timur, Bantul, Rabu.

Menurut dia, kehadiran balai besar itu akan memberikan kemudahan akses, khususnya bagi masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Melalui Laboratorium Virologi BBTCLPP Yogyakarta, masyarakat atas pasien bisa lebih cepat mengetahui negatif atau positif COVID-19 sehingga penanganan terhadap dirinya dan orang-orang yang melakukan kontak erat dengannya bisa cepat ditangani.

“Harapan saya (uji sampel) pasien di Yogyakarta dan Jawa Tengah cukup bisa diselesaikan di tempat ini hingga harapan saya hasilnya lebih cepat dan bisa diumumkan,” kata Sultan.

NEWS PERISTIWA SPORT SENI Hiburan KARTUN LIFE STYLE HERBA KEARIFAN CERMIN



Siap Rapid Test Massal, Pemda DIY Distribusikan 25.000 PCR

YOGYA (MIRAFI) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY mendistribusikan Polymerase Chain Reaction (PCR) sebanyak 25.000 buah, Ribosa Nucleid Acid (RNA) sebanyak 10.000 buah dan Viral Transport Medium (VTM) sebanyak 8.300 buah yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan test corona massal. Sementara itu pada Senin (4/3) dilaporkan tak ada penambahan pasien positif covid-19 di DIY.

Distribusi alat test corona itu dilakukan ke empat lokasi yakni RS Sardjito, Laboratorium Mikrobiologi UGM, RSA UGM dan BBTCLPP Yogyakarta. Ketiga komponen hanya dapat digunakan secara bersamaan, sehingga masih menunggu kelengkapan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY, Setyaning Hestu Lestari mengatakan, rincian alokasi RNA Kit dibenarkan kepada RSUD dr Sardjito dan Laboratorium Mikrobiologi sebanyak 3.200 buah dan BBTCLPP Yogyakarta sebanyak 6.400 buah. Adapun PCR didistribusikan untuk RSUD dr Sardjito dan Laboratorium Mikrobiologi UGM masing-masing 5.000 buah dan untuk BBTCLPP sebanyak 10.000 buah. “Untuk RNA sebanyak 3200 dan PCR sebanyak 5000 yang seharusnya menjadi jatah RSA UGM, saat ini masih tersimpan di Dinkes DIY karena tidak melakukan pemeriksaan. Jatahnya disimpan oleh Dinkes DIY karena memiliki pool room yang besar dan memadai untuk penyimpanan sehingga apabila ada terjakin pasien dapat didistribusikan dengan mudah,” jelasnya, Senin (4/3) di Yogyakarta.

Sementara, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY, Bambang Samudrala mengungkapkan, barisan reagen dari pusat sudah didistribusikan dengan cepat dan tepat meski ada beberapa kekurangan komponen. “Masih ada kekurangan dari komponen kompersen yang diberikan oleh pusat. Jumlah PCR, CTM, dan RNA harus sama. Untuk kekurangan jumlah ini sedang kita tunggu. Info dari pusat dalam minggu ini bisa turun. Ini sedang kita tunggu agar kekurangannya bisa cepat turun dan segera bisa didistribusikan,” ungkapnya. Rapid test massal sendiri dilakukan seiring dengan adanya surat edaran ketua gugus tugas penanganan Covid-19 tentang adanya kluster baru penyebaran corona di DIY.

”

Dinkes Bantul Tes "Swab" Massal

24 June 2020 | ahni_merapi | 0 Comments



MERAPI-ANTARA
Petugas dari Dinas Kesehatan Bantul, DIY, Selasa (23/6) bersiap melakukan tes usap (swab) massal bagi pelaku perjalanan.

BANTUL (MERAPI) – Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan usap (swab) dengan real time polymerase chain reaction (RT-PCR) massal bagi sebanyak 200 pelaku perjalanan guna mendeteksi ada tidaknya infeksi virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

"Hari ini adalah rangkaian dari kegiatan masif dan massal kita untuk mendeteksi masih ada tidaknya Covid-19 atau sumber penularan di masyarakat," kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Raharja disela melakukan tes usap massal di halaman Dinkes Bantul, Selasa (23/6).

Menurut dia, tes usap massal bagi 200 pelaku perjalanan oleh Dinkes Bantul akan dilakukan selama empat hari dalam dua periode, yakni periode pertama dilakukan pada 23 Juni dan 24 Juni kepada 100 orang, kemudian periode kedua pada 25 dan 26 Juni kepada 100 orang.

Dia mengatakan, pada Senin (22/6), pihaknya juga melakukan rapid diagnostic test (RDT) untuk Covid-19 kepada para pelaku perdagangan di toko ritel dan pusat perbelanjaan grosir di wilayah Kecamatan Piyungan guna mendeteksi dini potensi atau indikasi warga terkena virus corona.

"Jadi sudah dimulai dari kemarin kita maraton, di satu pihak kita melakukan rapid test di ritel grosir dan pasar, tapi satu pihak melakukan swab massal yang kita prioritaskan kepada pelaku perjalanan dari daerah yang transmisi lokal," katanya dikutip Antara.

Agus mengatakan, tes usap massal yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan Pemda DIY melalui Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta ini merupakan yang pertama di DIY dan diharapkan bisa diikuti daerah lain.

"Ini merupakan pionir dari DIY, baru pertama memulai, karena kita ingin segera mengetahui bahwa masyarakat yang ada di Bantul apakah terkonfirmasi Covid-19 atau tidak dan dengan swab massal, kita bisa langsung tahu masih ada potensi penularan di masyarakat atau tidak," katanya.

Dia mengatakan, tes usap massal ini juga sesuai amanah Presiden Joko Widodo bahwa diharapkan daerah-daerah melakukan secara masif untuk swab massal dengan target 5.000 orang per satu juta penduduk.

4 Warga India Peserta Itjima Gowa Positif Corona di Sleman

Suharjono

Minggu, 28 April 2020 - 16:45 WIB



Empat warga India yang berada di Sleman dinyatakan positif COVID-19. FOTO:GUMILAS

YOGYAKARTA - Penyebaran virus corona jenis baru, COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini dilaporkan empat warga India yang berada di Sleman dinyatakan positif Covid-19 hasil uji swab laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan COVID-19, Berty Murtiningsih mengatakan, sebanyak 9 warga India dilaporkan positif atas hasil rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan Sleman. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan melakukan swab yang dilakukan di Rumah Sakit UGM Yogyakarta. "Hari sebelumnya satu dinyatakan positif dan hari ini tiga lagi dinyatakan positif, sedangkan lima lainnya negatif," katanya kepada wartawan, Minggu (26/4/2020).

Dijelaskannya, dengan bertambahnya tiga kasus hari ini, total kasus positif di DIY sebanyak 82 kasus. Untuk tiga kasus Warga India ini masing-masing laki-laki 46 tahun, kemudian laki-laki usia 36 tahun, dan laki-laki usia 31 tahun. "Semua dalam karantina di RSPAU Harjulukito Bantul," katanya.

“

TEMPO.CO

Laboratorium Tes Corona di Yogya Mulai Beroperasi

Reporter: **Pribadi Wicaksono (Kontributor)**

Editor: **Ninis Chahunnisa**

Rabu, 18 Maret 2020 19:27 WIB

3 KOMENTAR



Prinsip TEM.CO Jakarta Pusat saat melakukan pemeriksaan cairan bioaktifan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di ruang (laboratorium Biologi SMA negeri 08 Jakarta di Salemba, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020). Pemerintah Provinsi DIY Jakarta memulokan untuk meneliti semua sebaran di lingkungan Provinsi DIY Jakarta selama dua minggu ke depan dan diganti pembalasan jernih jernih. TEMPO / Henter

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah DI Yogyakarta mulai mengoperasikan laboratorium pengujian **Corona** melalui Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) DIY yang beralamat di Jalan Imogiri Timur, Banguntapan, Bantul sejak Selasa, 17 Maret 2020.

Sarana yang ditunjuk Kementerian Kesehatan untuk pengujian sampel sebelum seorang dinyatakan positif atau negatif terpapar virus Corona itu bisa melakukan pengujian di daerah sehingga spesimen pasien tak perlu dibawa dan diuji lagi di Jakarta seperti yang selama ini dilakukan.

"Kami akan memeriksa sampel untuk dua wilayah layanan, Jawa Tengah dan DIY. Sehingga hasilnya bisa diketahui secepat mungkin untuk memutus rantai penularan," ujar Kepala BTKLPP Irene, Rabu, 18 Maret 2020.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang memantau langsung operasional laboratorium itu mengatakan melalui layanan itu, sampel pasien suspect di Yogya dan Jawa Tengah bisa diselesaikan di laboratorium itu sehingga hasilnya bisa lebih cepat diumumkan. "Prinsip kami, fasilitas ini bisa memberi kemudahan akses bagi warga Yogya dan Jawa Tengah sehingga cepat diketahui negatif atau positifnya untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

”

“

The screenshot shows a news article from TIMES INDONESIA. The main headline is "Tiga Laboratorium Dikerahkan, Yogyakarta Percepat Deteksi Kasus Covid-19". Below the headline, there is a date "Minggu, 12 April 2020 - 23:31" and social media sharing buttons for Facebook, Twitter, and WhatsApp. A data dashboard is visible, showing COVID-19 statistics for Yogyakarta:

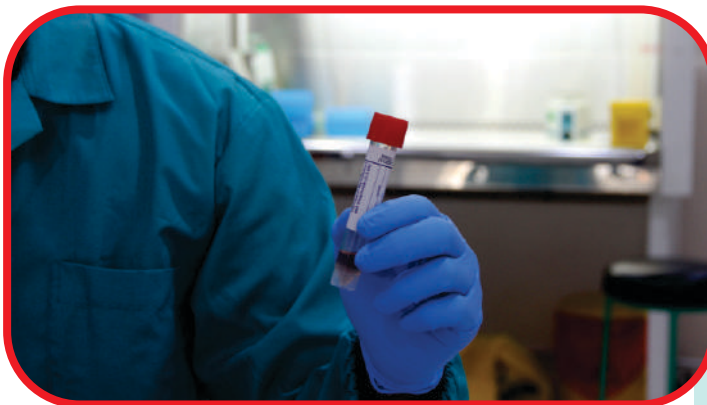
POSKO TERPADU			
498	TOTAL DATA PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP)		
3340	TOTAL DATA OBANG DALAM PEMANTAUAN (ODP)		
48	29	13	6
Pasien Suspek	Dirawat	Sembuh	Meninggal
282	103	165	14
Pasien	Suspek Hasil	Hasil Sahab	Meninggal
168	6		
Pasien Suspek	Meninggal		

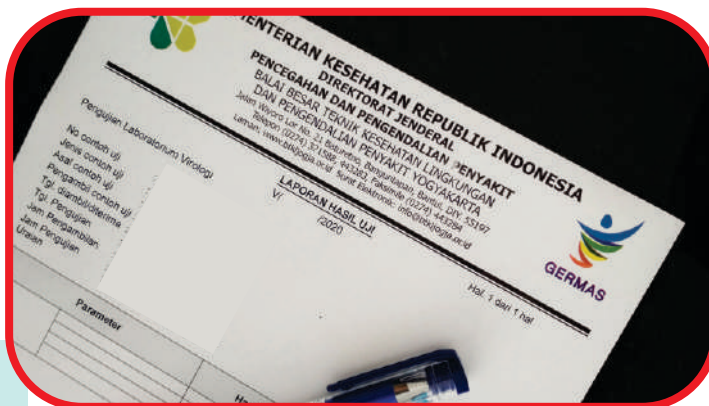
Below the dashboard, there is a "FOKUS" section with a sub-headline "> NKRI LAWAN CORONA". The article text mentions that the Pemda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) has allocated three laboratories in Yogyakarta to speed up the detection of citizens who are potentially infected with COVID-19.

”

"Pelaksanaan Pemeriksaan Covid-19 BBTKLPP Yogyakarta"







"Pelaksanaan Rutin Disinfeksi Ruang Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 BBTKLPP Yogyakarta"









btkljogja.or.id



bbtkljogja



bbtklppyogyakarta



bbtklppjogja



bbtklpp yogyakarta